



DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021–2026



“MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DAN
PRODUKSI PERIKANAN UNTUK MEMPERKOKOH LANDASAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN KETAPANG ”

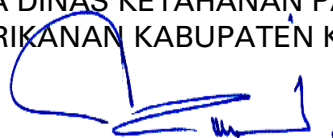
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.

Kerangka Penulisan Renstra DKPP ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yaitu **“MELANJUTKAN KETAPANG MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”**

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih terdapat kekurangan untuk itu masukan dan saran sangat kami harapkan dalam rangka kesempurnaannya, dan semoga Rencana Strategis ini bermanfaat dan memberikan andil dalam mewujudkan Ketapang yang maju menuju masyarakat sejahtera melalui **Panca Karya** yaitu **Ketapang Sehat, Ketapang Cerdas, Ketapang Nyaman, Ketapang Peduli dan Ketapang Sejahtera.**

Ketapang, Agustus 2021
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG



H. AGUS HENDRI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19660823 199403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	34
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	36
3.3 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian/Lembaga.....	37
3.4 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	49
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
BAB VIII PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang menurut Golongan /Pangkat Tahun 2021	12
Tabel 2.2	Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang menurut Jenjang Pendidikan.....	13
Tabel 2.3	Daftar Peralatan Kantor/Elektronik dan Studio Lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2021.....	15
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2017-2021	16
Tabel 2.5	Ketersediaan Produksi Pangan di Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021	17
Tabel 2.6	Data Pembangunan Lumbung Pangan di Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2018	18
Tabel 2.7	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Ketapang Tahun 2019-2021.....	22
Tabel 2.8	Jumlah Nelayan dan Unit Penangkapan Ikan di Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2021.....	22
Tabel 2.9	Data Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2021	24
Tabel 2.10	Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Kegiatan di Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2021.....	24
Tabel 2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2017-2021....	27
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2017-2021	29
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Daerah Urusan Pangan	47
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan	48

Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.....	50
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.....	52
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun	54
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang	12
Gambar 2.2	Proporsi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021	13
Gambar 2.3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Ketapang Tahun 2017-2021	20
Gambar 2.4	Grafik Jumlah Nelayan dan Unit Penangkapan Ikan di Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2021.....	23
Gambar 2.5	Grafik Data Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2021	24
Gambar 2.6	Grafik Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Ketapang Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2018-2021	25



BAB I PENDAHULUAN

cr picture: freepik

-
- **Latar Belakang**
 - **Landasan Hukum**
 - **Maksud Dan Tujuan**
 - **Sistematika Penulisan**
-

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 272 ayat 1 disebutkan bahwa “Perangkat Daerah” menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai “RENSTRA-SKPD” sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

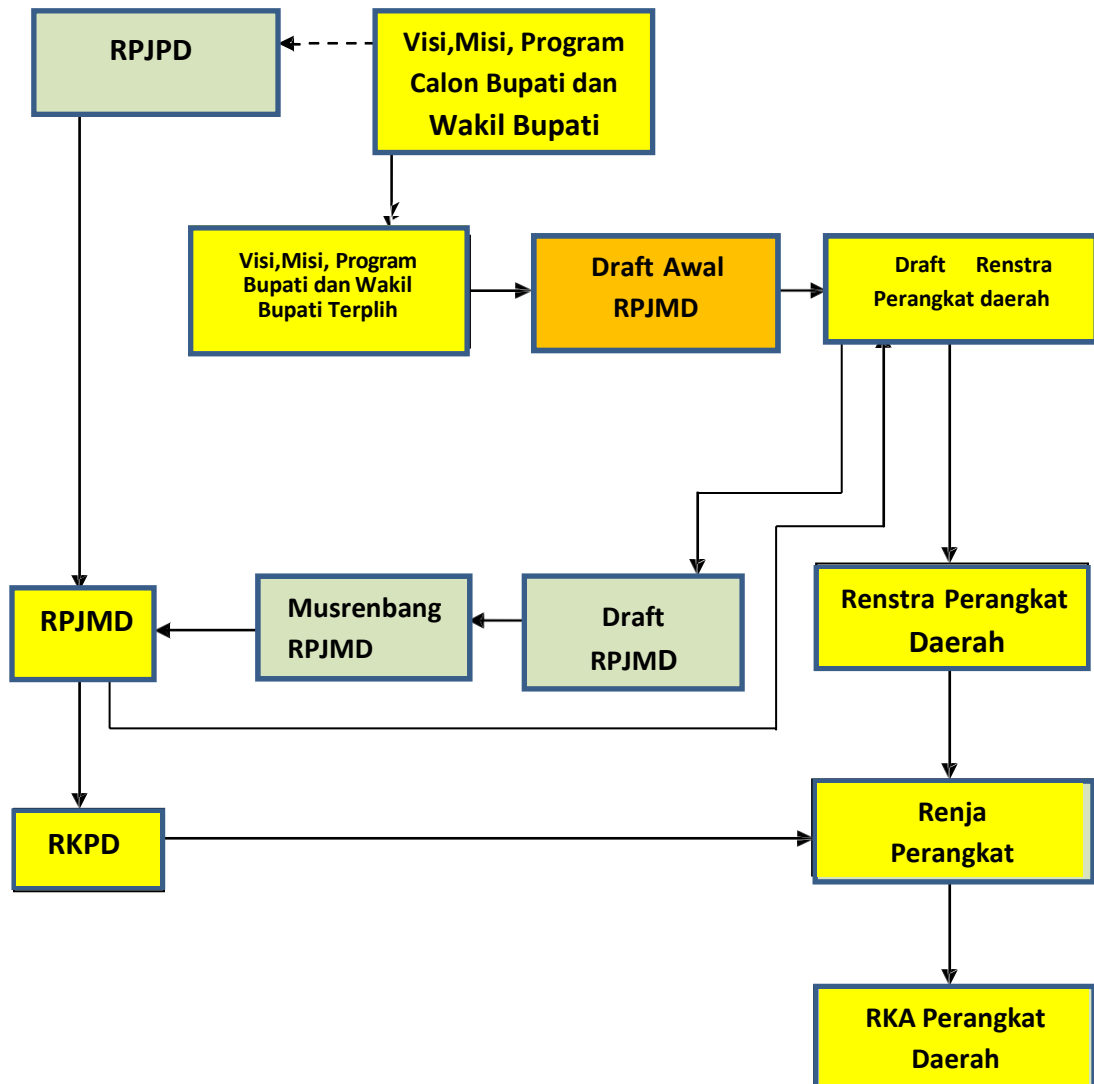
Perencanaan pembangunan dilihat dari sisi proses manajemen adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik agar memberikan manfaat serta dampak yang lebih besar.

Rencana strategis adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana strategis perangkat daerah berfungsi sebagai acuan terhadap apa yang akan dicapai untuk lima tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan lima tahunan. Oleh karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan turunan dari tahapan Renstra per tahun. Maka penyusunan

Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra Perangkat Daerah. Pada gambar berikut ini digambarkan keterkaitan antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya di daerah.

Gambar 1.1 :
Hubungan Renstra Perangkat Daerah
dengan Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya



Dokumen Renstra DKPP Tahun 2021-2026 adalah turunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, yang dalam

proses penyusunannya telah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025.

Renstra DKPP Tahun 2021-2026 ini akan dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (RENJA) DKPP sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Renstra yang disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf DKPP untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, Renstra ini juga diharapkan dapat mengarahkan penggunaan sumber daya secara konsisten dengan mengikuti peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, serta dilaksanakan secara obyektif dan transparan sesuai tugas dan fungsi DKPP.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis DKPP Tahun 2021-2026 mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026; dan
- l. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis DKPP Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan pedoman atau arah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di bidang urusan ketahanan pangan dan perikanan di Kabupaten Ketapang sehingga sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan disusunnya Renstra DKPP Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 adalah untuk:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan tujuan dan sasaran DKPP Kabupaten Ketapang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
2. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah bagi DKPP untuk menjadi pedoman bagi seluruh Bidang dan Sub Bagian pada unsur Sekretariat serta UPTD-nya dalam penyusunan Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan atau Rencana Kinerja Tahunan; dan
3. Pedoman dalam menentukan strategi dan arah kebijakan untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, dan untuk menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis DKPP Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Berisi tentang Struktur Organisasi DKPP dan dasar hukum pembentukannya, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya yang dimiliki, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada DKPP Kabupaten Ketapang untuk lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Berisi tentang Identifikasi Permasalahan, Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, Telaahan terhadap Renstra K/L, Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang ingin dicapai DKPP yang selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Ketapang dalam dokumen RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan DKPP Kabupaten Ketapang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam lima tahun yaitu mulai Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif selama 5 tahun yang dijabarkan menurut tahun dan program yang menjadi kewenangan DKPP Kabupaten Ketapang.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai DKPP Kabupaten Ketapang untuk menunjang pencapaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang komitmen dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas serta kaidah dalam pelaksanaan Renstra DKPP Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG

- **Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**
 - **Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**
 - **Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**
 - **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**
-

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang ketahanan pangan dan perikanan;
dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas dilakukan oleh Kepala Dinas melalui perangkat organisasinya yang terdiri dari unsur Sekretariat Dinas dan bidang-bidang teknis yaitu:

a. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan

dinas yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing sub bagian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas maka sekretariat dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan perencanaan dinas;
2. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan dinas;
3. Penyelenggaraan urusan kepegawaian dinas;
4. Penyelenggaraan urusan keuangan dinas;
5. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan dinas;
6. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada subbagian penyusunan program, subbagian keuangan dan subbagian umum dan kepegawaian; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Sekretaris Dinas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada sub bagian penyusunan program, pengelolaan keuangan, urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, dan evaluasi serta pelaporan dinas.

b. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan pangan, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang ketahanan pangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- 2) Penyusunan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- 3) Penyusunan pedoman pelaksanaan di bidang ketahanan pangan;

- 4) Penyelenggaraan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- 5) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi ketersediaan dan distribusi pangan dan seksi konsumsi dan keamanan pangan;
- 6) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap hidup mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perikanan tangkap yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perikanan tangkap menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap;
- 2) Penyusunan program dan kegiatan di bidang perikanan tangkap;
- 3) Penyusunan pedoman pelaksanaan di bidang perikanan tangkap;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan tangkap;
- 5) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pemberdayaan nelayan dan seksi pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- 6) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan tangkap; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang perikanan budidaya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perikanan budidaya, yang terbagi dan terperinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perikanan budidaya menyelenggarakan fungsi yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;
- 2) Penyusunan program dan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- 3) Penyusunan pedoman pelaksanaan di bidang perikanan budidaya;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- 5) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pemberdayaan dan pengembangan usaha perikanan dan seksi pengelolaan sarana dan prasarana budidaya ikan;
- 6) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

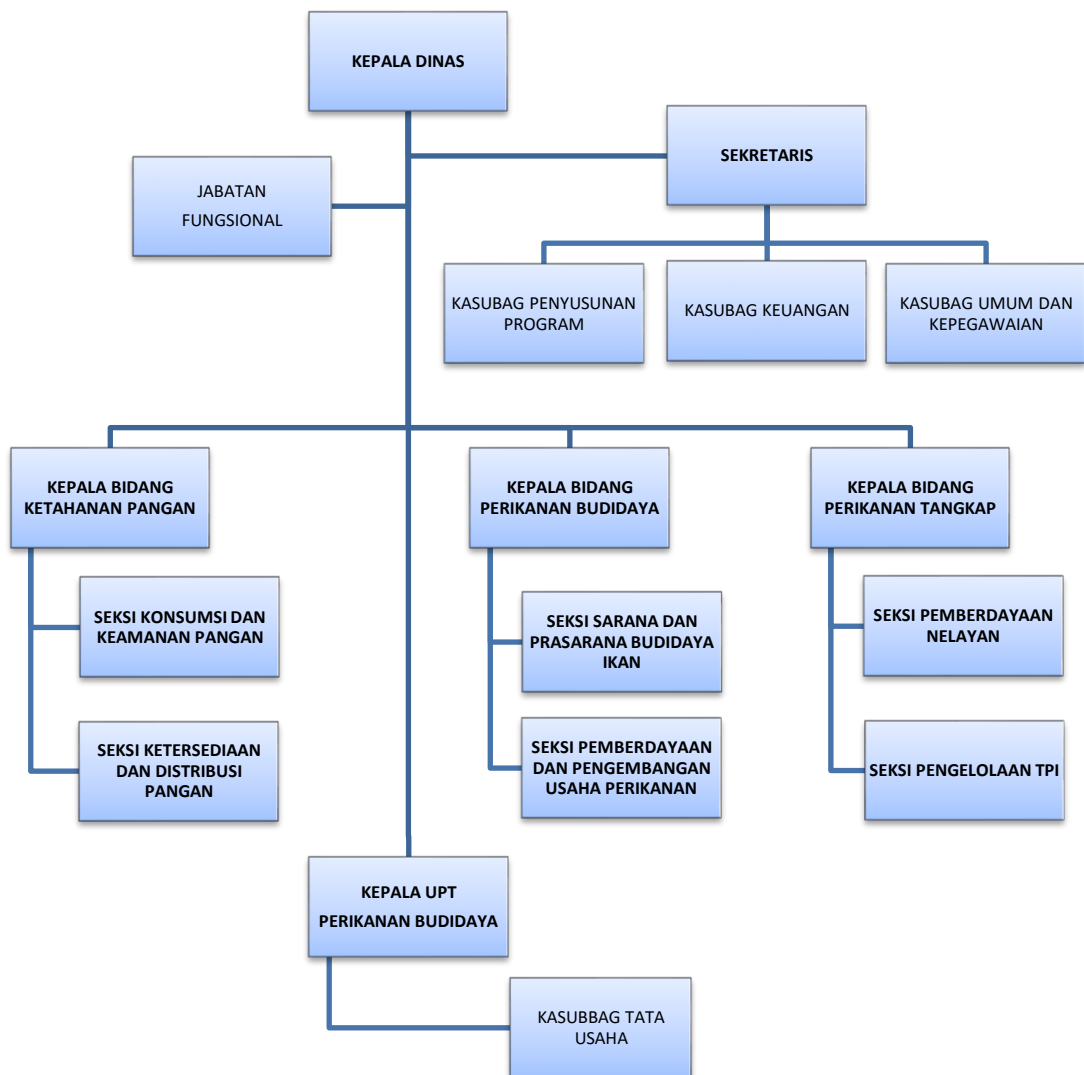
Di samping jabatan-jabatan tersebut di atas, juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu UPTD Perikanan Budidaya dan Kelompok Jabatan Fungsional yang kedudukannya langsung berada di bawah Kepala Dinas. Dalam pelaksanaan tugas teknis, UPTD Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Pengelolaan UPTD Perikanan Budidaya;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan UPTD Perikanan Budidaya; dan
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Perikanan Budidaya.

Susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi di atas selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penentuan strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk lebih lengkapnya, pada gambar berikut ini ditampilkan bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 48 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang mempunyai pegawai/personil PNS sebanyak 41 orang (per 31 Agustus Tahun 2021), terdiri dari:

- Pegawai yang bertugas di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebanyak 38 orang;
- Pegawai yang bertugas di UPT dan BBI sebanyak 3 Orang;

- Selain pegawai/personil PNS tersebut diatas juga dibantu oleh pegawai tidak tetap sebanyak 64 orang.

Berdasarkan golongan/pangkat pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri dari :

- Pegawai Golongan IV sebanyak 9 (sembilan) orang atau 21,95% dari jumlah keseluruhan pegawai;
- Pegawai Golongan III sebanyak 18 (delapan belas) atau 43,90% dari jumlah keseluruhan pegawai;
- Pegawai Golongan II sebanyak 14 (empat belas) atau 34,15% dari jumlah keseluruhan pegawai.

Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang berdasarkan golongan/pangkat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang menurut Golongan/Pangkat Tahun 2021

No	Gol/Pangkat	a	b	c	d	Jumlah
1	IV	5	3	1	-	9
2	III	3	2	1	12	18
3	II	1	2	3	8	14
Jumlah						41

Berdasarkan tingkatan pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang, maka distribusinya lebih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan setara/setingkat SLTA sebesar 41,46%, pegawai dengan tingkat pendidikan setingkat Diploma (D.III) sebanyak 2,44%, pegawai dengan tingkat pendidikan setingkat D.IV adalah 4,88%, pegawai dengan pendidikan setingkat S1 sebesar 34,15% dan pegawai dengan pendidikan setingkat S2 adalah 17,07%. Tabel di bawah ini menunjukkan persebarannya secara rinci yaitu sebagai berikut:

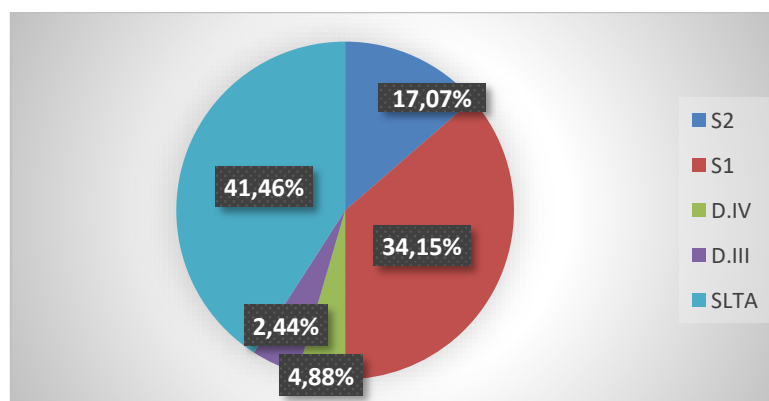
Tabel 2.2
Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2 - Magister Sains – M.Si - Magister Hukum - Magister Administrasi Pemerintahan – M.AP - Magister Sosial – M.Sos - Magister Pertanian – MP	2 1 1 2 1
2.	Strata 1 - Sarjana Perikanan – S.Pi - Sarjana Pertanian – S.P - Sarjana Teknologi Pertanian – S.TP - Sarjana Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian – S.PKP - Sarjana Ekonomi – SE - Sarjana Peternakan – Ir - Sarjana Teknik – ST	1 4 1 4 1 1 2
3.	Sarjana Muda (Diploma) - Diploma IV. Perikanan - Diploma III. Perikanan	2 1
4.	SLTA	17
Jumlah		41

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, sebagai instansi teknis, menunjukkan bahwa jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan teknis relatif kecil.

Komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang ditampilkan sebagai berikut :

Gambar 2.2
Proporsi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021



Permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah terkait kondisi Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah dan kualitas tenaga teknis bidang ketahanan pangan dan bidang perikanan seperti tenaga ahli pengolahan hasil perikanan dan budidaya termasuk untuk mendukung kegiatan budidaya perikanan pada UPTD Perikanan Budidaya.
2. Tenaga teknis lainnya seperti pranata computer, keuangan dan perencana masih sangat terbatas.
3. Tidak adanya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan Pangan dan perikanan;
4. Kurangnya pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Berdasarkan analisa kebutuhan pegawai, jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan belum mencukupi kebutuhan, selain itu pada kenyataannya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki belum optimal dalam melaksanakan tugas.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang hingga tahun 2021 terdiri dari gedung kantor, kendaraan bermotor, peralatan elektronik, peralatan studio sarana informasi dan sebagainya.

1. Gedung Kantor

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang memiliki :

- 1 unit gedung kantor yang terletak di kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang di Jalan Jendral Sudirman No.15 Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- 7 unit UPP yang terletak di Kecamatan Simpang Dua, Sungai Laur, Sungai Melayu Rayak, Air Upas, Manis Mata, Marau, Matan Hilir Utara dan 3 unit Pos Penyuluh Perikanan yang terletak di Kecamatan Tumbang Titi, Simpang Hulu Matan Hilir Selatan;

- 1 unit Gedung Kantor UPTD di Kecamatan Muara Pawan;
- 2 unit BBI yang terletak di Kecamatan Sandai dan Kecamatan Matan Hilir Utara (Dusun Manjau), 1 unit Panti Benih Mulia Baru dan 1 unit BPIP di Kecamatan Kendawangan.

2. Kendaraan Bermotor

Untuk menunjang kegiatan operasional para petugas dinas ketahanan pangan dan perikanan kabupaten ketapang memiliki kendaraan bermotor sebagai berikut:

- Kendaraan roda 4 sebanyak 4 unit;
- Kendaraan roda 2 sebanyak 33 unit.

3. Peralatan Kantor / Elektronik dan Studio Lainnya

Peralatan elektronik dan studio yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang meliputi adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Daftar Peralatan Kantor / Elektronik dan Studio Lainnya
pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang
Tahun 2021

No	Jenis Barang	Banyaknya (unit)
1.	Computer	10
2.	Laptop	18
3.	LCD dan Proyektor	2
4.	Telepone dan faximile	1
5.	Sarana WIFI	2
6.	TV	4
7.	AC	20
8.	Printer	25

2.2.3. Anggaran

Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang Tahun 2017-2021

TAHUN	ALOKASI ANGGARAN		REALISASI	
	MURNI Rp.	PERUBAHAN Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5
2017	21.811.210.251,00	14.704.526.434,00	14.022.652.189,00	95,36
2018	17.179.041.509,00	16.525.569.385,00	15.542.671.837,00	94,05
2019	14.513.613.968,00	14.606.982.940,00	13.998.754.067,00	95,84
2020	12.765.954.743,00	12.436.115.491,00	11.893.579.854,00	95,64
2021	11.593.596.506,00	12.923.150.191,00	11.372.511.839,00	88,00

Alokasi anggaran setiap tahun berdasarkan tabel tersebut di atas cenderung mengalami penurunan sehingga program dan kegiatan prioritas DKPP masih belum dapat secara optimal dapat dilaksanakan, karena sebagian besar anggaran yang ada dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja aparatur (gaji dan Tunjangan) dan biaya operasional yang sifatnya rutin untuk kebutuhan kantor termasuk belanja untuk gaji pegawai Non PNS (tenaga kontrak).

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Bidang Ketahanan Pangan

Kinerja bidang ketahanan pangan difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Ketapang termasuk pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai standar pelayanan. Upaya yang dilakukan sesuai tugas pdan fungsi di bidang ketahanan pangan yaitu:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan;
- b. Memperbaiki jalur distribusi dan akses pangan;
- c. Penganekaragaman dan keamanan pangan; dan

d. Penanganan kerawanan pangan.

a. Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten yang mempunyai lahan potensi pertanian yang cukup luas sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pertanian dan peningkatan produksi pertanian yang diharapkan kedepannya dapat menjadi kabupaten penyedia pangan secara nasional. Ditinjau dari perkembangannya, ketersediaan pangan di Kabupaten Ketapang selalu mengalami peningkatan khususnya padi, jagung, kacang-kacangan, sayuran dan tanaman lainnya. Kebutuhan pangan di Kabupaten Ketapang hampir terpenuhi seluruhnya baik yang berasal dari potensi domestik maupun dari luar. Selain ketersediaan dan konsumsi pangan utama yaitu beras, jagung, kedelai kacang-kacangan dan umbi-umbian, Kabupaten Ketapang memiliki sumber pangan lainnya yaitu ikan sungai, ikan laut dan ikan hasil budidaya air tawar, selain itu sumber pangan lain berasal dari ternak seperti telur dan daging.

Pada tabel di bawah ini ditampilkan hasil produksi Pangan di Kabupaten Ketapang dari tahun 2016 hingga tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.5
Ketersediaan Produksi Pangan di Kabupaten Ketapang
Tahun 2016-2021

No.	Jenis Tanaman	Produksi (Ton) / Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Padi	103.065	112.507	132.192	110.963	149.259	107.660
2.	Jagung	862	1.526	3.686	5.205	5.387	3.532
3.	Ubi Kayu	12.223	12.666	17.221	13.627	23.934	27.651
4.	Ubi Jalar	1.315	1.645	1.925	1.142	1.115	1.072
5.	Kacang Tanah	78	75	33	-	-	-
6.	Kacang Kedelai	101	10	57	-	-	-

Berdasarkan tabel 2.5, pada tahun 2020 – 2021 komoditas padi, jagung, dan ubi jalar mengalami penurunan jumlah produksi sementara jumlah produksi ubi kayu mengalami peningkatan. Dalam rangka pemanfaatan ketersediaan pangan diusahakan pula pengembangan cadangan pangan masyarakat berupa pengembangan lumbung pangan dan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Pembangunan lumbung pangan ini telah dilaksanakan di 5 (lima) Kecamatan sebanyak 15 (lima belas) unit yang dibangun dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Adapun data pembangunan lumbung pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Data Pembangunan Lumbung Pangan di Kabupaten Ketapang
Tahun 2015-2018

No	Kecamatan	Jumlah Lumbung (Unit)	Biaya Pembangunan Lumbung (Rp)	Sumber Dana	Tahun Pelaksanaan
1	Matan Hilir Utara	1	100.000.000	APBN	2015
2	Matan Hilir Selatan	7	842.020.000	APBD	2016
3	Benua Kayong	2	197.720.000	APBD	2016
4	Muara Pawan	1	98.860.000	APBD	2016
5	Matan Hilir Utara	1	98.860.000	APBD	2016
6	Kendawangan	1	143.301.000	APBD	2017
7	Matan Hilir Utara	1	141.620.000	APBD	2017
8	Simpang Hulu	1	140.436.000	APBD	2017
9	Benua Kayong	1	145.531.000	APBD	2018
10	Matan Hilir Selatan	1	141.422.000	APBD	2018
Jumlah		15	2.049.770.000		

Pengembangan lumbung pangan merupakan upaya pengembangan cadangan pangan yang dilaksanakan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di pedesaan pada saat musim paceklik. Upaya yang dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat dengan tujuan :

1. Memfasilitasi masyarakat dalam penyediaan pangan;
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan lumbung pangan untuk menjadi salah satu lembaga penggerak ekonomi pedesaan;

3. Mewujudkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup.

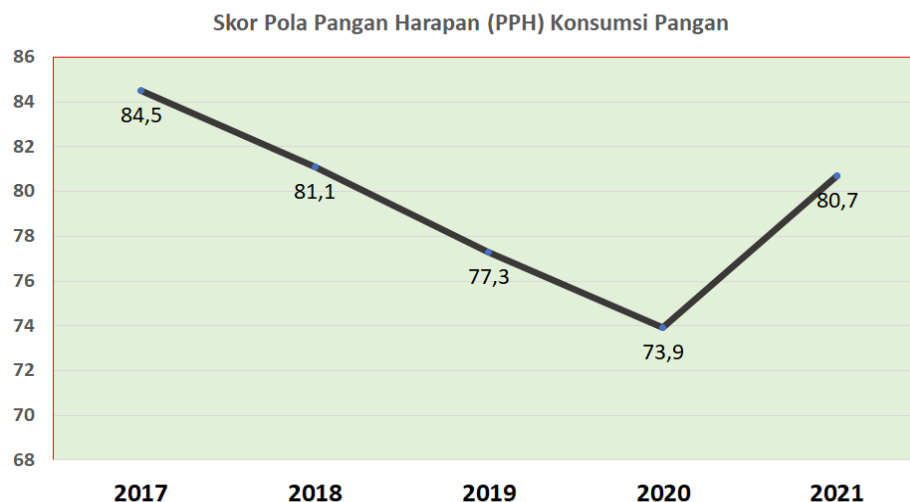
Ketersediaan pangan juga dikembangkan melalui pemanfaatan perkarangan, dimaksudkan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai cadangan di pekarangan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, lahan pekarangan dikelola melalui pendekatan terpadu dengan berbagai jenis tanaman, untuk menjamin ketersediaan bahan pangan yang beraneka ragam secara berkala guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga.

b. Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat, maka kebutuhan pangan terhadap jenis dan kualitas produk juga semakin meningkat dan beragam. Oleh karena itu selain peningkatan produksi pangan, peningkatan penganekaragaman pangan menjadi sangat penting terutama untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu.

Kebutuhan pangan masyarakat Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Ketapang pada umumnya masih menggantungkan pada beras sebagai sumber karbohidrat, sehingga konsumsi beras melebihi yang dianjurkan. Penganekaragaman pangan merupakan salah satu strategi untuk mencapai ketahanan pangan, salah satu upaya peningkatan penganekaragaman pangan yaitu dengan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) yang diwujudkan melalui pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang dicerminkan oleh meningkatnya skor pola pangan harapan (PPH). Semakin tinggi peningkatan skor PPH menggambarkan pencapaian keragaman konsumsi pangan semakin besar, maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan konsumsi dinilai semakin baik. Adapun data skor PPH Konsumsi pangan Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.3
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Ketapang
Tahun 2017-2021



Tren skor PPH berdasarkan gambar 2.3 menunjukkan angka yang cukup menurun selama 2017-2020. Skor PPH Konsumsi masyarakat Kabupaten Ketapang tahun 2017 mencapai 84,5 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu 81,1. Pada tahun 2019-2020 kembali mengalami penurunan skor PPH Konsumsi berturut-turut menjadi 77,3 dan 73,9. Skor PPH Konsumsi Pangan Kabupaten Ketapang mengalami peningkatan pada tahun 2021 yaitu 80,7. Skor ini masih terbilang jauh dari target ideal yaitu 100 dan belum terpenuhinya target kinerja perangkat daerah tahun 2021 yaitu 88 atau persentase realisasi pencapaian sebesar 90,70 %. Hal ini disebabkan belum bervariasinya tingkat konsumsi pangan masyarakat setempat. Konsumsi masyarakat masih didominasi padi-padian. Perlu adanya peningkatan konsumsi umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, dan sayur dan buah.

Pembangunan keamanan pangan merupakan bagian pembangunan ketahanan pangan yang tidak dapat dipisahkan yang penting dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan dapat menjamin ketersediaan pangan yang aman, termasuk pangan segar dan makanan jadi untuk dikonsumsi masyarakat sehingga masyarakat terhindar dari pangan yang terkontaminasi oleh pencemaran biologis. Dalam rangka meningkatkan keamanan pangan khususnya produk pangan segar asal tumbuhan

dibutuhkan pengadaan alat *rapid test pesticide* yang mudah dan efisien untuk diaplikasikan.

2.3.2. Kinerja Pelayanan Bidang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Ketapang menyebar di 20 Kecamatan dengan potensi, karakteristik dan daya dukung yang berbeda. Misalnya di kecamatan pesisir dengan potensi kawasan perkotaan, ruang terbuka hijau dan kawasan hutan kota, kawasan budaya dan alam, kawasan pengolahan hasil perikanan, kawasan produksi peternakan, selain itu juga merupakan kawasan sentra tanaman pangan, kawasan industri berbasis tanaman pangan dan kawasan produksi perikanan, sedangkan di kecamatan perhuluan merupakan potensi kawasan pertambangan, perkebunan, sentra pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, budidaya perikanan, pariwisata alam, sentra peternakan dan sebagainya.

Kegiatan utama sektor perikanan adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha pengolahan hasil perikanan. Ketiga usaha tersebut memberikan kontribusi dalam penyediaan bahan pangan dari protein hewani. Dengan demikian pengembangan usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Ketapang perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar.

A. Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan di Kabupaten Ketapang lebih didominasi oleh hasil perikanan laut. Pada tahun 2019 hasil perikanan tangkap mencapai 19.611,20 ton dan mengalami peningkatan tahun 2020 sebesar 13,24% menjadi 22.256,76 ton. Sedangkan pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan menjadi 23.365,54 ton. Target 2021 untuk jenis produksi perikanan tangkap (ton) Kabupaten Ketapang sebesar 24.243 ton belum dapat tercapai karena realisasi baru mencapai 91,27%.

Perlu adanya strategi untuk peningkatan hasil produksi perikanan tangkap dan metode pendataan ke lapangan yang lebih efektif dan efisien.

Pada tabel berikut ini ditampilkan hasil perikanan tangkap di Kabupaten Ketapang mulai tahun 2019-2021.

Tabel 2.7
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Ketapang
Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jenis Produksi (TON)			Jumlah
		Perairan Laut	Perairan Umum	Ikan Awetan	
1	2019	18.135,00	1.476,20	-	19.611,20
2	2020	21.092,32	1.164,44	-	22.256,32
3	2021	22.125,97	1.239,57	-	23.365,54

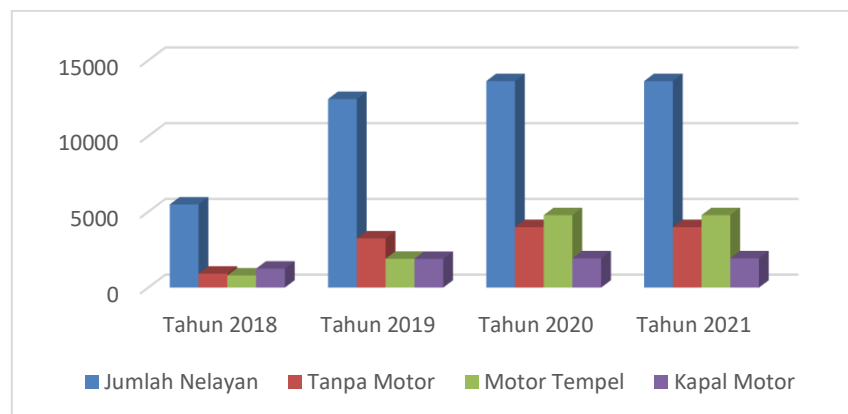
Secara umum Kabupaten Ketapang mempunyai potensi sumberdaya alam yang sangat besar dengan panjang pantai terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 481,2 km. Selain perairan laut juga dialiri oleh beberapa sungai besar seperti Sungai Pawan, Sungai Pesaguan, Sungai Tengar dan lain sebagainya, namun sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Selain sumber yang melimpah, Kabupaten Ketapang memiliki sumberdaya manusia selaku pelaku utama pemanfaat potensi kelautan dan perikanan didominasi oleh nelayan tradisional dengan sarana penangkapan ikan yang masih sederhana. Adapun data jumlah nelayan dan unit penangkapan ikan yang diperoleh berdasarkan survey lapangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8
Jumlah Nelayan dan Unit Penangkapan Ikan di Kabupaten Ketapang
Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Nelayan	Unit Penangkapan Ikan		
			Tanpa Motor	Motor Tempel	Kapal Motor
1	2018	5.490	923	801	1.255
2	2019	12.458	3248	1906	1898
3	2020	13.639	3.998	4.788	1.936
4	2021	13.639	3.998	4.788	1.936

Jumlah nelayan dan unit penangkapan ikan pada tahun 2018– 2021 berdasarkan Tabel 2.8 dapat disimpulkan terjadi peningkatan secara berkala. Unit penangkapan ikan dengan kategori mesin <5GT termasuk dalam kelompok motor tempel, sementara unit penangkapan ikan dengan kategori mesin 5-10 GT dan 20-30 GT termasuk dalam kelompok kapal motor. Tidak ada perubahan data dari tahun 2020-2021 karena tidak dilakukan survey setiap tahunnya.

Gambar 2.4
Grafik Jumlah Nelayan dan Unit Penangkapan Ikan di Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2021



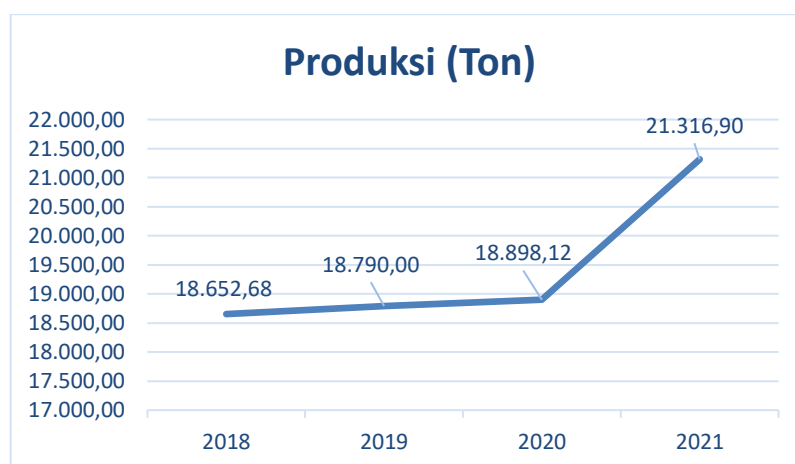
b. Perikanan Budidaya

Pemenuhan kebutuhan ikan di Kabupaten Ketapang dapat dipenuhi dari minat masyarakat untuk melakukan kegiatan budidaya. Pada tahun 2018 jumlah produksi perikanan budidaya mencapai 18.653,00 ton. Terjadi peningkatan jumlah produksi pada tahun 2019 sebesar 0,73% menjadi 18.790,00 ton. Pada tahun 2020 dan 2021 kembali terjadi peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya masing-masing yaitu 18.898,12 ton dan 21.316,90 ton. Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Ketapang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Data Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Ketapang
Tahun 2018 – 2021

No.	Tahun	Produksi (TON)
1.	2018	18.652,68
2.	2019	18.790,00
3.	2020	18.898,12
4.	2021	21.316,90

Gambar 2.5
Grafik Data Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Ketapang
Tahun 2018 – 2021



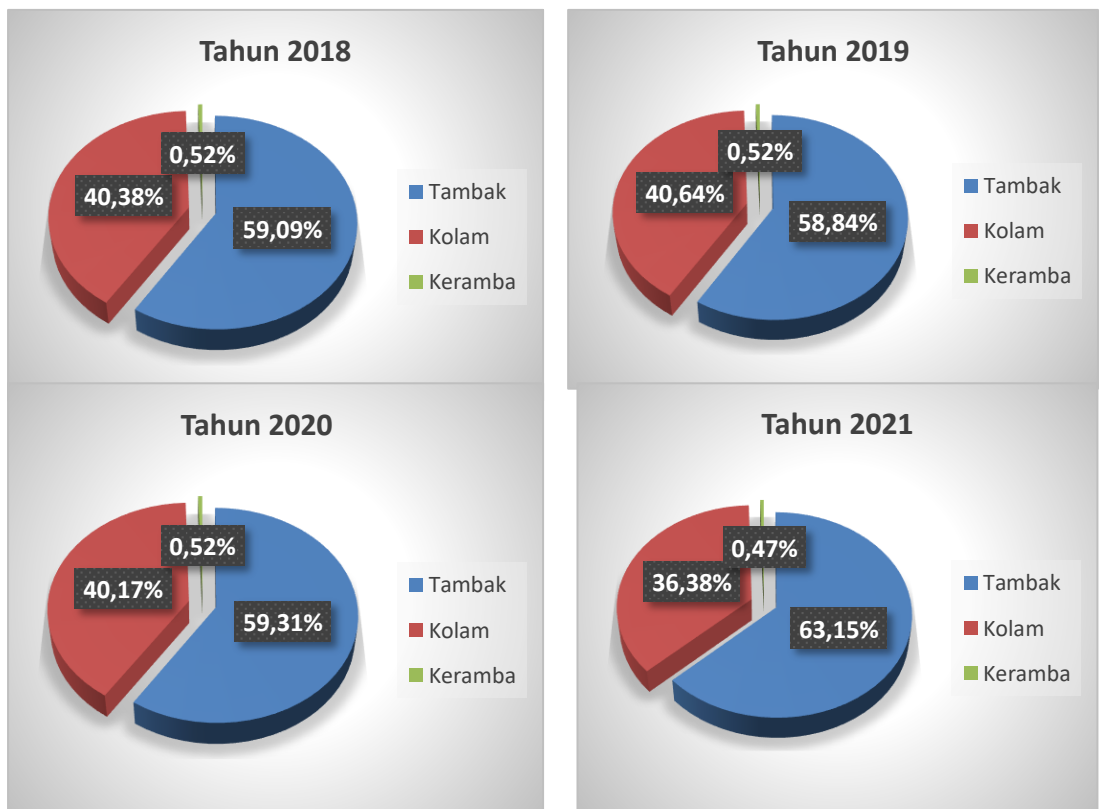
Produksi perikanan budidaya Kabupaten Ketapang dibagi berdasarkan jenis kegiatan budidaya yaitu budidaya tambak, budidaya kolam dan budidaya keramba. Produksi perikanan budidaya berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Kegiatan
Di Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2021

Tahun	Jenis Kegiatan Budidaya			
	Tambak	Kolam	Keramba	Total
2018	10.975,48	7.580,10	97,10	18.652,68
2019	11.103,80	7.588,00	98,20	18.790,00
2020	11.208,00	7.592,12	98,00	18.898,12
2021	13.461,68	7.755,24	99,80	21.316,90

Faktor yang mempengaruhi peningkatan hasil produksi perikanan budidaya ada beberapa faktor diantaranya meningkatnya jumlah populasi penduduk Kabupaten Ketapang, permintaan pasar dan perusahaan terutama di area Kendawangan, dan adanya bantuan teknologi bioflok dari Pemerintah Kabupaten Ketapang. Target 2021 untuk jumlah produksi hasil budidaya sebesar 20.370 ton dapat tercapai dengan persentase sebesar 104,65%.

Gambar 2.6
Grafik Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Ketapang
Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2018-2021



Program peningkatan produksi perikanan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan dapat dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan masyarakat baik berupa pemberian bantuan maupun peningkatan sumberdaya manusia perikanan melalui pelatihan.

2.3.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan sesuai Renstra Tahun 2016-2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 48 Tahun 2016, tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang adalah untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan perikanan sesuai dengan kewenangan kabupaten.

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang selama 5 (lima) tahun mengacu pada sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021 dan Renstra serta penetapan indikator kinerja utama (IKU) beserta formulasi pengukuran indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi terhadap target kuantitatif sasaran strategis, yaitu terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran strategis.

Review terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis dinilai dengan melihat perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021 yang sekaligus merupakan indikator kinerja utama (IKU) adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.11 berikut ini.

Tabel 2.11 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Terhadap Kebutuhan Pangan				10%	11%	12%	13%	14%	10,37%	19,17%	11,50%	22,85%	14,32%	103,70%	174,27%	95,83%	175,77%	102,29%
2	Skor Pola Pangan Harapan				78,80	81,10	83,40	85,70	88,00	84,50	81,10	77,30	73,90	80,70	107,23%	100%	92,69%	86,23%	91,70%
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				17.840	18.110	18.654	19.400	20.370	18.468	18.653	18.790	18.898	21.316,90	103,52%	103%	100,73%	97,41%	104,65%
4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				22.498	22.845	23.301	23.767	24.243	22.846	25.842	19.611,20	22.256,76	23.365,54	101,55%	113,12%	84,16%	93,65%	96,38%
5	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat				43,43	45,65	48,75	52,88	54,57	49,41	52,89	52,42	50,10	51,50	113,77%	115,86%	107,53%	94,74%	94,37%

Berdasarkan tabel 2.11 di atas tergambar bahwa capaian kinerja utama pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk masing-masing sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan periode Tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase ketersediaan Cadangan Pangan terhadap kebutuhan pangan pada akhir periode renstra dari tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif atau berubah-ubah walaupun tahun 2021 telah mencapai 102,29%.
2. Skor Pola Pangan harapan juga menunjukkan trend yang fluktuatif dari tahun ke tahun hingga akhir periode Renstra capaiannya baru sebesar 91,7%
3. Untuk Produksi perikanan budidaya setiap tahun mengalami peningkatan dan pada akhir periode Renstra mencapai 104,65% dari target, sementara jumlah produksi perikanan tangkap baru tercapai sebesar 96,38% dibandingkan dengan target pada akhir periode renstra.
4. Tingkat konsumsi ikan masyarakat, capainnya adalah 51,50 kg/kapita dari target sebesar 54,57 kg/kapita atau 94,37%.

Untuk mencapai sasaran strategis, maka alokasi dan realisasi anggaran selama periode pelaksanaan renstra tahun 2016-2021 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.12 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas selama 5 tahun periode Renstra menunjukkan kecenderungan menurun sehingga pencapaian kinerja utama secara umum belum tercapai.
2. Proporsi penyerapan anggaran dengan membandingkan antara realisasi dengan alokasi anggaran setiap tahun rata rata telah di atas 90%.
3. Rata-rata angka pertumbuhan/peningkatan anggaran menunjukkan trend yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak anggaran berbagai program yang belum dipenuhi secara optimal sesuai kebutuhan perangkat daerah sehingga capaian kinerja belum sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana direncanakan dalam Renstra.

Tabel 2.12 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang Tahun 2017-2021

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA	14.704.526.434	16.525.571.406	14.606.982.940	12.436.117.516	-	14.022.652.189	15.542.673.863	13.998.754.067	11.893.581.884	-	95,4%	94,1%	95,8%	95,6%	-	-5,43%	-5,34%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.698.231.478	3.930.872.140	3.916.022.102	4.103.622.765	-	4.565.689.126	3.904.791.895	3.642.847.380	3.853.039.490	-	97,2%	99,3%	93,0%	93,9%	-	-4,41%	-5,50%
BELANJA PEGAWAI	4.698.231.478	3.930.872.140	3.916.022.102	4.103.622.765	-	4.565.689.126	3.904.791.895	3.642.847.380	3.853.039.490	-	97,2%	99,3%	93,0%	93,9%	-	-4,41%	-5,50%
BELANJA LANGSUNG	10.006.294.956	12.594.699.266	10.690.960.838	8.332.494.752	-	9.456.963.063	11.637.881.968	10.355.906.687	8.040.542.394	-	94,5%	92,4%	96,9%	96,5%	-	-5,92%	-5,26%
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.854.049.733	1.636.723.228	1.271.586.744	1.006.640.122	-	1.818.361.535	1.588.001.923	1.240.398.340	972.851.886	-	98,1%	97,0%	97,5%	96,6%	-	-18,42%	-18,82%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	219.643.617	459.490.000	202.500.000	140.270.001	-	218.336.812	452.538.997	201.693.518	135.575.565	-	99,4%	98,5%	99,6%	96,7%	-	-13,88%	-14,69%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	21.775.000	-	-	26.439.512	-	21.775.000	-	-	25.398.555	-	100,0%	-	-	96,1%	-	6,68%	5,26%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	106.999.866	107.385.847	528.832.000	115.226.150	-	105.691.059	97.532.707	526.943.206	114.530.658	-	98,8%	90,8%	99,6%	99,4%	-	2,50%	2,71%
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN / PERKEBUNAN)	1.307.218.750	1.227.174.835	811.086.455	-	-	1.285.664.030	1.209.287.050	806.773.088	-	-	98,4%	98,5%	99,5%	-	-	-21,23%	-20,78%
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	3.560.161.743	4.085.963.805	2.064.515.800	2.535.678.550	-	3.397.339.005	3.616.948.359	1.927.381.343	2.488.825.592	-	95,4%	88,5%	93,4%	98,2%	-	-10,70%	-9,85%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	2.650.518.747	4.779.472.900	5.812.439.839	2.378.128.620	-	2.423.868.122	4.492.649.466	5.652.717.192	2.361.643.930	-	91,4%	94,0%	97,3%	99,3%	-	-3,55%	-0,86%
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	285.927.500	254.799.300	-	132.250.000	-	185.927.500	138.552.880	-	132.212.300	-	65,0%	54,4%	-	100,0%	-	-22,66%	-10,74%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PERENCANAAN PERIKANAN	-	43.687.330	-	-	-	-	42.368.560	-	-	-	-	97,0%	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	-	-	-	491.465.392	-	-	-	-	467.882.466	-	-	-	-	95,2%	-	-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	-	-	-	1.328.444.380	-	-	-	-	1.164.439.412	-	-	-	-	87,7%	-	-	-
PROGRAM PERENCANAAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	-	-	-	177.950.000	-	-	-	-	177.180.000	-	-	-	-	99,6%	-	-	-
BELANJA DAERAH	-	-	-	-	12.923.150.191	-	-	-	-	11.372.511.839	-	-	-	-	88,0%	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	7.143.100.478	-	-	-	-	6.104.044.846	-	-	-	-	85,5%	-	-
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-	-	-	351.102.300	-	-	-	-	317.895.810	-	-	-	-	90,5%	-	-
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-	-	-	39.903.850	-	-	-	-	39.343.566	-	-	-	-	98,6%	-	-
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	49.996.000	-	-	-	-	100,0%	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	-	-	3.958.656.410	-	-	-	-	3.695.135.971	-	-	-	-	93,3%	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	-	1.380.387.153	-	-	-	-	1.166.095.646	-	-	-	-	84,5%	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Provinsi Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Ketapang dianugerahi potensi sumberdaya alam yang besar untuk mengembangkan sentra produksi pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan masyarakat dan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah, baik dari sisi keragaman jenis maupun dari sisi stok sumberdaya ikan yang didukung oleh kondisi lingkungan perairan yang masih sangat baik. Namun demikian, kondisi tersebut belum memberikan dampak positif secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan di Kabupaten Ketapang khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki tantangan dan peluang, berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pertanian khususnya Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi terhadap perencanaan lima tahun ke depan.

Tantangan yang akan dihadapi dalam rangka peningkatan pelayanan ketahanan pangan dan perikanan adalah:

1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam masih perlu ditingkatkan, karena masih banyak ditemukan penggunaan bahan dan alat penangkap ikan terlarang (peralatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti meracun dan menyetrum serta tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas lahan produktif;
2. Perubahan iklim yang semakin tidak menentu menjadi tantangan tersendiri di Provinsi Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Ketapang dalam meningkatkan ketahanan pangan di berbagai wilayah.
3. Jalur infrastruktur distribusi pangan yang masih belum baik sehingga berpengaruh terhadap ketahanan pangan dan harga pangan di berbagai wilayah di kecamatan.

4. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi pangan dan konsumsi pangan;
5. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang, terbatasnya prasarana saluran irigasi, keterbatasan ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, dan serangan hama dan penyakit ikan/udang serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya;
6. Pada aspek pengolahan hasil perikanan masih dihadapkan pada beberapa kondisi yang belum sepenuhnya dapat mendukung persyaratan mutu produk olahan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan keterampilan, teknologi pengolahan, akses permodalan dan pemasaran produk;
7. Sarana dan prasarana alat tangkap ikan yang masih terbatas dan sederhana dan teknologi penangkapan ikan masih sangat tradisional;
8. Permasalahan dalam penyediaan pakan ikan yang harganya relative semakin tinggi setiap tahun;
9. Kebiasaan penangkapan ikan masih menggunakan racun (TUBA) dan penyetruman sehingga merusak dan mengancam keberlanjutan dari ekosistem ikan;
10. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit mengubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena factor kebiasaan.

Adapun peluang yang mendukung pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah:

1. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Proyek Strategis Daerah (PSD) untuk mendukung Ketahanan Pangan dan Perikanan melalui pembangunan Food Estate, pengembangan Kawasan agroforestry dan agropolitan.

2. Tingginya potensi sumber daya alam yang mendukung untuk pengembangan ketahanan pangan dan potensi sumber daya kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap/perairan umum maupun perikanan budidaya yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
3. Tingginya permintaan ikan, baik untuk memenuhi pasar lokal maupun untuk ekspor serta pertumbuhan usaha perikanan rakyat ke usaha perikanan maju seiring dengan naiknya pamor perikanan sebagai sumberdaya pangan unggulan;
4. Kebijakan program yang mendukung pemantapan ketahanan pangan berbasis sumberdaya lokal.
5. Keragaman sumberdaya alam dan keragaman hayati baik flora dan fauna belum dikelola secara optimal sebagai sumber pangan untuk mendukung peningkatan konsumsi masyarakat;
6. Semakin meningkatnya peran pelaku usaha perikanan serta iklim dunia usaha yang semakin kondusif;
7. Adanya Pengembangan kluster usaha pengolahan hasil perikanan dalam bentuk UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang berbasis pada produk bernilai tambah dan memenuhi selera pasar;
8. Adanya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan bidang ketahanan pangan dan perikanan;
9. Tersedianya Penyajian data dan informasi sumberdaya, sarana dan prasarana serta jaringan usaha di bidang kelautan dan perikanan Kalimantan Barat;
10. Tingginya permintaan terhadap produksi pangan dan perikanan seiring berkembangnya usaha sektor perkebunan dan pertambangan di Kabupaten Ketapang; dan
11. Peningkatan kesadaran akan gizi ikan yang lebih sehat dapat menjadi peluang pengembangan pasar bagi komoditas dan produk perikanan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG

cr picture: freepik

-
- **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**
 - **Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**
 - **Telaahan Terhadap Renstra Kementerian/Lembaga**
 - **Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**
 - **Penentuan Isu-Isu Strategis**
-

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah gambaran mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap sasaran strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri atas identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Ketapang.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan antara lain:

1. Belum optimalnya ketahanan pangan yang diukur dari indeks ketersediaan, indeks keterjangkauan dan indeks pemanfaatan, termasuk stok cadangan pangan utama dan masih kurangnya lumbung pangan serta sarana pendukungnya.
2. Belum optimalnya sarana infrastruktur pendukung distribusi pangan di Kabupaten Ketapang dan ketersediaan toko tani yang belum berkembang.
3. Belum optimalnya konsumsi terhadap pangan yang berkualitas karena belum optimalnya diversifikasi (panganekaragaman) pangan lokal non-beras, sehingga tidak terfokus pada satu jenis makanan saja.

4. Penurunan produksi perikanan perairan umum karena beberapa sebab indikatif, seperti kurangnya pengetahuan/kapasitas SDM nelayan, kurangnya peralatan perikanan tangkap yang memadai, belum optimalnya pengawasan di kawasan perikanan tangkap (masyarakat masih ada yang menggunakan racun ikan, setrum), dan belum optimalnya sarana prasarana perikanan tangkap.
5. Penurunan produksi perikanan budidaya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan/kapasitas SDM pelaku pembudidaya, jangkauan distribusi benih ikan budi daya yang masih belum memadai, belum optimalnya pengawasan kawasan perikanan budidaya (penggunaan keramba yang berlebihan di kawasan sungai), dan belum optimalnya sarana prasarana perikanan budidaya.
6. Tingginya harga pakan ikan yang baik di pasaran sehingga sangat menurunkan minat para kelompok pembudidaya ikan untuk mengembangkan usahanya karena biaya produksi yang terlalu besar.
7. Kualitas produk perikanan kurang memiliki daya saing. Persoalan ini disebabkan oleh kurangnya penjaminan mutu dalam pengolahan ikan segar.
8. Meningkatnya jumlah nelayan yang bekerja tanpa motor di Kabupaten Ketapang. Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah nelayan yang tidak menggunakan motor tahun 2018 hingga 2020, Meningkatnya jumlah nelayan yang tidak menggunakan motor disebabkan oleh beberapa sebab indikatif, seperti kurangnya permodalan dan sulitnya akses untuk mencari bantuan permodalan.
9. Terbatasnya alat penangkap ikan yang ramah lingkungan merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap kapasitas produksi perikanan tangkap. Jika alat penangkap ikan

tersedia dengan baik dan memadai, maka produksi perikanan tangkap dan di perairan umum /sungai dapat dinaikkan secara bertahap.

10. Sulitnya nelayan perikanan tangkap/perairan umum untuk mendapatkan BBM Solar Bersubsidi dari Pemerintah sehingga berpengaruh kepada frekuensi aktivitas penangkapan ikan di laut dan hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil produksi perikanan tangkap sepanjang tahun.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 adalah **“Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”**. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan daerah Kabupaten Ketapang, yaitu:

- 1. Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik;**
- 2. Melanjutkan peningkatan pembangunan infrastruktur;**
- 3. Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing;**
- 4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merata dan berkeadilan;**
- 5. Memperkokoh landasan perekonomian masyarakat; dan**
- 6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat Ketapang.**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut di atas telah dirumuskan berbagai Program Prioritas Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan dalam **PANCA KARYA** yaitu:

- 1. Ketapang Sehat;**
- 2. Ketapang Cerdas;**
- 3. Ketapang Nyaman;**

4. Ketapang Peduli; dan

5. Ketapang Sejahtera.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya akan melaksanakan program prioritas untuk mendukung terwujudnya Visi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang melalui **misi kelima** yaitu **“Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat”** melalui pelaksanaan program prioritas seperti Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi untuk peningkatan perekonomian dari sektor ketahanan pangan dan perikanan adalah adanya trend penurunan ketahanan pangan masyarakat dan belum optimalnya peningkatan produksi sektor perikanan yang potensinya cukup besar di wilayah Kabupaten Ketapang.

3.3. Telaahan Terhadap Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1 Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian sebagai penerjemahan dari Visi **“Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** maka **pembangunan pertanian dan pangan** diarahkan dalam mewujudkan ***Pertanian Maju, Mandiri dan Modern*** untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani.

Kebijakan pangan juga diarahkan kepada pembangunan berbasis kewilayahan guna mengurangi ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah. Arah kebijakan Kementerian Pertanian sesuai dengan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, maka kebijakan pertanian diarahkan untuk ***mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian.***

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut:

- a. **Terjaganya ketahanan pangan nasional;**
- b. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
- c. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian;
- d. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian,
- e. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dan
- f. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Berdasarkan fokus kebijakan Kementerian Pertanian tersebut, apabila dijabarkan lebih lanjut, maka strategi yang dilakukan untuk **terjaganya ketahanan pangan nasional** adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas sektor Pertanian;
- 2) Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional; dan
- 3) Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021-2026 selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Renstra Kementerian Pertanian. Upaya yang harus dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Ketapang adalah melalui pengembangan food estate dan/atau pengembangan wilayah sentra produksi pangan termasuk perbaikan jalur distribusi dan pengendalian harga pangan.

3.3.2. Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam tahun 2020-2024 adalah:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan,

- pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
2. Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;
 3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
 4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait; dan
 5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Arah kebijakan yang selaras dan didukung sesuai kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada level kewenangan kabupaten saat ini adalah arah kebijakan mulai nomor 1-3 sedangkan 4-5 merupakan kewenangan provinsi.

Strategi pelaksanaan untuk arah kebijakan **“Memperbaiki komunikasi dengan nelayan evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan”** dilaksanakan dengan strategi, antara lain:

- a. membuka komunikasi dengan *stakeholders* untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi, dan pengetahuan yang faktual;
- b. optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI;
- c. penguatan penyediaan dan pemanfaatan data stok sumber daya ikan;
- d. perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah;

- e. pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (*eco fishing port*), dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional;
- f. eksplorasi perikanan di ZEEI dan laut lepas;
- g. fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, serta optimalisasi peran BLU-LPMUKP/Bank Nelayan;
- h. peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan termasuk kelompok nelayan perempuan, diversifikasi usaha nelayan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi hak atas tanah nelayan, dan perlindungan HAM Perikanan;
- i. penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan;
- j. pengelolaan perikanan di perairan umum;
- k. pengembangan armada perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- l. partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan Indonesia (RFMOs);
- m. pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumber daya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital;
- n. pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
- o. penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap.

Arah kebijakan **“Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat melalui pengembangan industrialisasi perikanan budidaya yang berkelanjutan didukung dengan modernisasi teknologi dan manajemen usaha yang efisien, kemudahan akses permodalan dan perizinan usaha,**

infrastruktur yang memadai, sarana input produksi yang bermutu, perlindungan usaha budidaya, dan sinergisitas program dengan lintas sektor” dilaksanakan dengan strategi, antara lain:

- a. akselerasi peningkatan produksi *aquaculture*/perikanan budidaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan budidaya;
- b. pembangunan/revitalisasi tambak udang dan bandeng;
- c. pengembangan komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis penting di semua tipologi ekosistem;
- d. pengembangan pakan ikan mandiri yang terdiri dari pakan buatan dan pakan alami;
- e. pengembangan sistem perbenihan ikan nasional melalui penguatan jejaring atau sistem logistik perbenihan nasional, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana balai benih ikan, unit perbenihan ikan di masyarakat, dan *broodstock center*, serta modernisasi teknologi;
- f. pengembangan kawasan kluster usaha budidaya ikan yang berkelanjutan;
- g. pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan kawasan perikanan budidaya yang dilakukan antara lain melalui *surveillance* hama dan penyakit ikan, pengujian residu produk perikanan budidaya, modernisasi sarana laboratorium, dan pembangunan pusat kesehatan ikan terpadu;
- h. pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi perikanan budidaya di bidang pembesaran, pembenihan, dan pakan;
- i. pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya air payau, air tawar, dan air laut;
- j. peningkatan kerja sama dan sinergisitas kebijakan, program, anggaran, dan data perikanan budidaya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lintas sektoral;
- k. penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;

- l. pengaturan akses perizinan dan investasi usaha perikanan budidaya yang mudah dan murah bagi pelaku usaha;
- m. pengembangan SKPT; dan
- n. penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan budidaya.

Arah kebijakan **“Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan”** dilaksanakan dengan strategi, antara lain:

- a. peningkatan kualitas, kapasitas, dan produktivitas industri pengolahan ikan/udang, dan rumput laut;
- b. peningkatan standardisasi, ketelusuran (*traceability*), jaminan mutu, dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
- c. penataan rantai pasok hasil perikanan;
- d. pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan dan penguatan daya saing Unit Pengolahan Ikan (UPI);
- e. pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan;
- f. peningkatan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan;
- g. pelaksanaan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan;
- h. perluasan akses pasar, pengembangan sistem pemasaran produk berbasis digital, peningkatan promosi produk perikanan untuk skala internasional, penguatan *branding* produk kelautan dan perikanan Indonesia, pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor;
- i. pembinaan dan pengelolaan pasar ikan, pengembangan kawasan pengolahan, pembangunan fasilitas pemasaran perikanan skala internasional;
- j. pemetaan preferensi, konsumsi, dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri;

- k. peningkatan partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan dan optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG);
- l. penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil kelautan dan perikanan, Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan;
- m. peningkatan unit penanganan dan unit pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan;
- n. pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju *zero waste*;
- o. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan pasca panen, dan peralatan pengolahan;
- p. peningkatan ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan, hilirisasi industri rumput laut, dan sumber daya alam laut bernilai tambah;
- q. fasilitasi kemudahan pelaku usaha untuk berinvestasi, mengakses pembiayaan, teknologi dan pasar, serta didukung regulasi yang kondusif;
- r. pelaksanaan uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- s. penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui pengembangan kawasan usaha;
- t. harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan, penerapan standardisasi mutu, sertifikasi, dan ketelusuran produk (*traceability*);
- u. pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi;
- v. penguatan laboratorium acuan penyakit ikan karantina dan mutu hasil perikanan, serta jejaring laboratorium keamanan pangan hasil perikanan;

- w. peningkatan layanan sertifikasi ekspor/impor/domestik berbasis elektronik, penyederhanaan layanan, serta pengembangan inovasi pelayanan publik;
- x. pengembangan SKPT; dan
- y. penguatan Unit Pelaksana Teknis mutu hasil perikanan dan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021-2026 juga telah selaras dengan tujuan dan sasaran strategis serta strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Selama 5 (lima) tahun ke depan Program Prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan juga akan direncanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 sesuai tugas pokok dan fungsinya yang selaras dengan tujuan dan sasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut di atas dengan dukungan dana APBD dan APBN (DAK).

Pengembangan sektor perikanan budidaya dan peningkatan sarana dan prasarana perikanan juga menjadi faktor keberhasilan daerah dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Ketapang yang telah direncanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

3.4 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memperhatikan dan mempertimbangkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035. Keselarasan dokumen RTRW, RPJMD, dan Renstra adalah untuk menjamin terwujudnya

pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup di Kabupaten Ketapang secara berkelanjutan.

Struktur ruang dalam RTRW Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035 merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten untuk melayani seluruh kegiatan skala kabupaten. Rencana pengembangan sistem pusat kegiatan terdiri dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Sementara itu, rencana sistem jaringan prasarana terdiri dari rencana pengembangan sistem jaringan transportasi; rencana pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan; rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi; rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air; rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan; dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan maksud agar pengkajian pengaruh tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program serta kegiatan dikaji untuk memastikan agar kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Terintegrasinya prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar pelaksanaan KLHS diterapkan sejak dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan ke dalam empat pilar, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021-2026, memerlukan kajian sesuai RTRW dan KLHS seperti penentuan wilayah untuk sentra

produksi pangan, pengembangan food estate, agroforestry dan agropolitan dan revitalisasi danau untuk pengembangan sektor perikanan budidaya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah **kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi oleh perangkat daerah di masa datang**. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, ada sebanyak 5 isu strategis daerah. Dari kelima isu strategis tersebut, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah isu strategis yang pertama, yaitu **“Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan”**. Dari sisi tugas pokok dan fungsi DKPP hal ini berdampak pada belum optimalnya ketahanan pangan dan belum optimalnya pertumbuhan sektor perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang potensinya cukup besar di Kabupaten Ketapang.

Selanjutnya berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, telaahan terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan, telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan terhadap RTRW dan KLHS, serta telaahan terhadap isu strategis Kabupaten Ketapang, dapat diidentifikasi isu strategis di bidang ketahanan pangan dan perikanan seperti dijelaskan pada sub bagian selanjutnya. Metode penentuan isu strategis yang menjadi akar masalah yang harus ditangani ditentukan dengan metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* yaitu sebagaimana dijelaskan pada penjabaran berikut ini.

3.5.1 Permasalahan Pangan

Ketahanan pangan Kabupaten Ketapang mengalami penurunan pada tahun 2018 hingga 2019, walaupun peringkat Kabupaten Ketapang menjadi lebih baik hingga tahun 2021. Kondisi ini mencerminkan adanya penurunan indeks ketahanan pangan di wilayah lain, begitu juga dengan wilayah Kabupaten Ketapang. Masalah pokok yang dihadapi urusan wajib non-pelayanan dasar bidang pangan adalah menurunnya ketahanan pangan. Berikut ini adalah merupakan pemetaan masalah pokok, dan akar masalah dari isu strategis bidang pangan yaitu:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Daerah Urusan Pangan

No	Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya ketahanan pangan	Menurunnya ketahanan pangan	Belum optimalnya ketersediaan pangan	Stok cadangan pangan belum optimal
				Masih kurangnya lumbung pangan dan sarana pendukungnya
			Belum optimalnya akses distribusi pangan	Infrastruktur pendukung distribusi pangan belum berkondisi baik
				Ketersediaan toko tani belum memadai
		Belum optimalnya konsumsi terhadap pangan yang berkualitas	Diversifikasi pangan non-nasi masih belum optimal	

3.5.2 Permasalahan Kelautan dan Perikanan

Potensi sub sektor perikanan yang sangat besar di Kabupaten Ketapang, belum mampu dikembangkan dan bahkan mengalami penurunan pada tahun 2015 hingga 2019. Penurunan tertinggi di sektor perikanan terjadi

pada tahun 2017 hingga 2018, yaitu sebesar 0,37 persen. Masalah pokok yang dihadapi urusan perikanan adalah **menurunnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian**. Berikut ini merupakan pemetaan permasalahan daerah urusan kelautan dan perikanan.

Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kontribusi sektor Perikanan terhadap Perekonomian	Menurunnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Kurangnya pengetahuan / kapasitas SDM nelayan
				Masih kurangnya peralatan perikanan tangkap yang memadai
				Belum optimalnya pengawasan kawasan perikanan tangkap (menggunakan racun ikan, setrum)
				Belum optimalnya sarana prasarana perikanan tangkap
			Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	Kurangnya pengetahuan / kapasitas SDM pelaku pembudidaya
				Jangkauan distribusi benih ikan budi daya masih belum memadai
				Belum optimalnya pengawasan kawasan perikanan budidaya (penggunaan keramba yang berlebihan di kawasan sungai)
			Belum optimalnya kualitas produk perikanan	Belum optimalnya sarana prasarana perikanan budidaya
				Kurangnya penjaminan mutu dalam pengolahan ikan segar



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

cr picture: freepik

-
- **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**
-

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun secara keseluruhan. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra DKPP Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasarannya harus selaras dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang.

Dari hasil telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, telaahan terhadap tugas dan fungsi serta hasil perumusan isu-isu strategis maka tujuan DKPP yaitu:

- 1. Meningkatnya Kedaulatan Pangan;**
- 2. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan; dan**
- 3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang Akuntabel dan Menopang Pelayanan Publik.**

Dari penetapan tujuan tersebut kemudian ditetapkan indikator tujuan, sasaran yang akan dicapai melalui penyusunan berbagai program dan kegiatan, sehingga lebih bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, dan mempunyai jangka waktu untuk pencapaiannya yang secara rinci ditampilkan pada tabel berikut ini.

TABEL 4.1. (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kedaulatan Pangan	-	Indeks Ketahanan Pangan	76,8	78,56	80,32	82,08	83,84
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketersediaan	86,73	87,64	87,96	88,84	88,97
			Indeks Keterjangkauan	82,32	83,43	83,85	84,74	84,87
			Indeks Pemanfaatan	61,43	62,44	62,56	63,44	63,88
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan	-	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan	0,41	0,83	2,07	3,62	4,53
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	24.428,05	26.648,78	28.869,52	31.090,24	33.310,98
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	20.787,93	22.866,73	25.153,40	27.668,74	30.435,61
		Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat	11%	11%	12%	12%	12%
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang Akuntabel dan Menopang Pelayanan Publik	-	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	56 (CC)	60,01 (B)	62 (B)	66 (B)	70 (BB)
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	12 (C)	17 (C)	20 (CC)	21,8 (B)	23 (B)



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

-
- **Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**
-

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien dan akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah dalam RPJMD.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara yang saling terkait untuk mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan pemetaan permasalahan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan disusun dengan memperhatikan tantangan dan peluang. Strategi merupakan cara yang lebih umum dibandingkan dengan arah kebijakan. Arah kebijakan berfungsi untuk memfokuskan strategi melalui penjabaran dimensi, target, maupun lokus program dan kegiatan.

Pada tabel berikut ini dijabarkan strategi dan arah kebijakan untuk masing-masing tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.1 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang

VISI				
: Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera				
MISI 1				
Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang akuntabel dan menopang pelayanan publik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Peningkatan Kelembagaan Berbasis Kinerja	Peningkatan ketersediaan dan kualitas data kinerja	
			Pelaksanaan, Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	
			Pelaksanaan pemerintahan dengan Akuntabel, Handal dan Terpercaya	
			Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah	
			Peningkatan kompetensi manajerial, teknis, dan fungsional	
			Peningkatan sistem pelayanan publik daerah	
			Peningkatan sistem pengadaan barang dan jasa	
MISI 5				
: Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Kedaulatan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Peningkatan ketersediaan pangan	Peningkatan stok cadangan pangan	
			Pengembangan food estate sebagai pusat pangan daerah	
			Peningkatan lumbung pangan dan sarana pendukungnya	
		Peningkatan akses distribusi pangan	Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung distribusi pangan	
			Pengembangan toko tani	
Peningkatan konsumsi pangan alternatif	Peningkatan diversifikasi pangan non-nasi			
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Peningkatan pengetahuan / kapasitas SDM nelayan	
			Peningkatan peralatan perikanan tangkap	
			Peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap	
			Penurunan penggunaan racun ikan dan setrum di kawasan perikanan tangkap	
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Peningkatan pengetahuan / kapasitas SDM pelaku pembudidaya
				Peningkatan jangkauan distribusi benih ikan budidaya
				Peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya
				Penurunan penggunaan keramba yang berlebihan di kawasan sungai
	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Peningkatan nilai tambah produk perikanan	Peningkatan nilai tambah produk perikanan	Peningkatan Penjaminan Mutu dalam pengolahan ikan segar
				Optimalisasi perikanan berbasis teknologi



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

cr picture: freepik

-
- **Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**
 - **Indikator dan Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**
 - **Pendanaan Indikatif**
-

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Penetapan rencana program diperlukan sebagai panduan dalam menyusun prioritas kegiatan dan untuk pengalokasian sumber daya.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021-2026 mengacu kepada dokumen RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 dan Uraian program, kegiatan serta sub kegiatan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kemudian pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika memang diperlukan. Sumber dana untuk pendanaan indikatif dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berasal dari APBD Kabupaten Ketapang dan sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian besarnya setiap tahun selalu disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah serta regulasi yang mengatur tentang keuangan daerah.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan, kemudian indikator kinerja program dan kegiatan, serta target kinerja program dan kerangka pendanaan mulai tahun 2021-2026 adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1 (T-C. 27)
Rancangan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkannya kedaulatan pangan	Meningkatkan ketahanan pangan	1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				1.236.000.000		2.632.381.363		2.744.676.617		3.000.897.811		3.184.167.702		12.798.123.493		
		2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				1.236.000.000		2.632.381.363		2.744.676.617		3.000.897.811		3.184.167.702		12.798.123.493		
		2.09.02	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Peningkatan Lumbung Pangan dan Sarana Pendukungnya	81,12%	1,50 %	400.000.000	1,90%	1.000.000.000	2%	1.050.000.000	2,10%	1.102.500.000	2,40%	1.190.700.000	2,40%	4.743.200.000		
		2.09.02.2.01	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten /kota	Persentase tempat penyimpanan pangan yang tersedia		1,50 %	400.000.000	1,50 %	1.000.000.000	1,50 %	1.050.000.000	1,50 %	1.102.500.000	1,50 %	1.190.700.000	1,50 %	4.743.200.000		
		2.09.02.2.01.01	Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	1 unit	1 unit	200.000.000	1 unit	250.000.000	1 unit	250.000.000	1 unit	250.000.000	1 unit	250.000.000	5 unit	1.200.000.000		
		2.09.02.2.01.02	Penyediaan infastruktur lantai jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	2 unit	2 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	6 unit	1.000.000.000		
		2.09.02.2.01.03	Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	0 unit	0 unit	-	3 unit	330.000.000	3 unit	350.000.000	4 unit	400.000.000	4 unit	450.000.000	14 unit	1.530.000.000		
		2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	0 lap	0 lap	-	1 lap	175.000.000	1 lap	200.000.000	1 lap	200.000.000	1 lap	200.000.000	4 lap	775.000.000		
		2.09.02.2.01.05	Penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	0 dok	0 dok	-	1 dok	45.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	52.500.000	1 dok	90.700.000	4 dok	238.200.000		
		2.09.03	Program peningkatan diversifikasi dan	Persentase peningkatan stok cadangan pangan	86,12%	1,3%	745.000.000	2%	1.540.016.363	2%	1.601.617.017	1,90%	1.793.811.059	2%	1.883.501.612	2%	7.563.946.051		
		Persentase Toko Tani Yang Berkembang	85,25%	86,35 %		87,45%		88,55%		91,05%		92,15%		92,15%					
		Persentase Peningkatan Diversifikasi Pangan Non-Nasi	65%	70%		75%		80%		85,00%		90%		90,00%					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Persentase dokumen informasi ketersediaan dan harga pangan yang akurat	100%	100%	140.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	940.000.000		
		2.09.03.2.01.01	Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Lap	1 Lap	70.000.000	1 Lap	100.000.000	1 Lap	100.000.000	1 Lap	100.000.000	1 Lap	100.000.000	1 lap	470.000.000		
		2.09.03.2.01.04	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 dok	1 dok	70.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	470.000.000		
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Persentase Peningkatan Kelembagaan dan distribusi pangan	10%	10%	180.000.000	10%	405.016.363	10%	405.016.363	10%	497.210.405	10%	446.900.958	10%	1.934.144.089		
		2.09.03.2.01.03	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	0 lap	0 lap	50.000.000	1 Lap	50.000.000	1 Lap	50.000.000	1 Lap	50.000.000	1 Lap	60.000.000	1 lap	260.000.000		
		2.09.03.2.01.05	Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	0 unit	0 unit	50.000.000	2 unit	55.016.363	2 unit	55.016.363	2 unit	55.016.363	2 unit	55.016.363	8 unit	270.065.452		
		2.09.03.2.01.06	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	2 unit	2 unit	80.000.000	2 unit	300.000.000	2 unit	300.000.000	2 unit	392.194.042	2 unit	331.884.595	10 unit	1.404.078.637		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman (B2SA)	100%	100%	70.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	500.000.000	100%	1.770.000.000		
		2.09.03.2.01.02	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Lap	1 Lap	70.000.000	1 Lap	100.000.000	1 Lap	100.000.000	1 Lap	100.000.000	1 Lap	100.000.000	1 lap	470.000.000		
		2.09.03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	0 keluarga	0 keluarga	-	100 kel	300.000.000	100 kel	300.000.000	100 kel	300.000.000	100 kel	400.000.000	400 kel	1.300.000.000		
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/kota	Persentase pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan yang terlaksana		100%	195.000.000	100%	275.000.000	100%	336.600.654	100%	436.600.654	100%	476.600.654	100%	1.719.801.962		
		2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 Lap	1 Lap	25.000.000	1 Lap	25.000.000	1 Lap	25.000.000	1 Lap	25.000.000	1 Lap	25.000.000	5 lap	125.000.000		
		2.09.03.2.02.02	Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	0 dok	0 dok	25.000.000	1 dok	25.000.000	1 dok	25.000.000	1 dok	25.000.000	1 dok	25.000.000	4 dok	125.000.000		
		2.09.03.2.02.03	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 ton	10 ton	120.000.000	10.15 ton	200.000.000	10.32 ton	261.600.654	10.52 ton	361.600.654	10.73 ton	401.600.654	51.72 ton	1.344.801.962		
		2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota yang Terpelihara	0 ton	0 ton	25.000.000	10.15 ton	25.000.000	10.32 ton	25.000.000	10.52 ton	25.000.000	10.73 ton	25.000.000	51.72 ton	125.000.000		
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Persentase data target konsumsi pangan yang akurat		100%	160.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	1.200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	0 dok	0 dok	50.000.000	1 dok	80.000.000	1 dok	80.000.000	1 dok	80.000.000	1 dok	80.000.000	1 dok	370.000.000		
		2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 lap	2 lap	50.000.000	2 lap	100.000.000	2 lap	100.000.000	2 lap	100.000.000	2 lap	100.000.000	10 lap	450.000.000		
		2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi per kapita per tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 lap	1 lap	60.000.000	1 lap	80.000.000	1 lap	80.000.000	1 lap	80.000.000	1 lap	80.000.000	1 lap	380.000.000		
		2.09.04	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase penurunan desa rawan pangan	n/a	2,20 %	41.000.000	2,30%	41.615.000	2,5%	43.279.600	2,70%	48.473.152	2,90%	50.896.810	2,90%	225.264.562		
		2.09.04.2.01	Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Persentase dokumen peta FSVA yang tersedia	100%	100%	21.000.000	100%	10.615.000	100%	10.279.600	100%	13.473.152	100%	13.896.810	100%	69.264.562		
		2.09.04.2.01.01	Penyusunan, pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 dok	1 dok	21.000.000	1 dok	10.615.000	1 dok	10.279.600	1 dok	13.473.152	1 dok	13.896.810	1 dok	69.264.562		
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Persentase koordinasi penanganan daerah rawan pangan	100%	100%	20.000.000	100%	31.000.000	100%	33.000.000	100%	35.000.000	100%	37.000.000	100%	156.000.000		
		2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten /Kota	1 lap	1 lap	20.000.000	1 lap	15.000.000	1 lap	15.000.000	1 lap	16.000.000	1 lap	17.000.000	1 lap	83.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 dok	0 dok	-	1 dok	16.000.000	1 dok	18.000.000	1 dok	19.000.000	1 dok	20.000.000	1 dok	73.000.000		
		2.09.05	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase produk pangan yang terbebas dari zat kimia diluar ambang batas	70,00%	80,00 %	50.000.000	85%	50.750.000	90%	49.780.000	95,00%	56.113.600	100%	59.069.280	100%	265.712.880		
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan	70,00%	80,00 %	50.000.000	81%	50.750.000	82%	49.780.000	82,00%	56.113.600	82%	59.069.280	82%	265.712.880		
		2.09.05.2.01.01	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota yang dibina	-	-	-	-	-	1 Dok	1.000.000	1 Dok	1.000.000	1 Dok	1.000.000	1 Dok	3.000.000		
		2.09.05.2.01.03	Registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	-	1 Dok	1.000.000	1 Dok	1.000.000	1 Dok	1.000.000	1 Dok	3.000.000		
		2.09.05.2.01.04	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	-	1 Dok	1.000.000	1 Dok	1.000.000	1 Dok	1.000.000	1 Dok	3.000.000		
		2.09.05.2.01.05	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuh daerah kabupaten /kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.750.000	1 Dok	49.780.000	1 Dok	56.113.600	1 Dok	59.069.280	1 Dok	265.712.880		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	3	Usuran Pemerintahan Pilihan				6.297.390.137		9.064.434.459		9.444.363.277		10.332.897.360		10.667.283.216		45.806.368.449			
		3,25	Usuran Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				6.297.390.137		9.064.434.459		9.444.363.277		10.332.897.360		10.667.283.216		45.806.368.449			
		3.25.03	Program Pengelolaan perikanan tangkap	Persentase nelayan yang terlatih	2351 Kapal Nelayan	15%	3.378.000.000	20%	4.141.520.000	25%	4.030.050.000	30%	4.050.200.250	100%	4.070.451.251	100%	19.670.221.501		Bidang Perikanan	Kab Ketapang
				Persentase Peningkatan Peralatan Perikanan Tangkap	NA	15%		20%		25%		30%		30%		30%				
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	2 TPI	15%		20%		25%		30%		30%		30%						
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Persentase Penggunaan Alat Tangkap ramah lingkungan dan berkelanjutan	NA	15%	1.737.631.500	20%	2.373.730.862	25%	2.231.549.297	30%	2.155.879.463	30%	2.631.414.424	30%	11.130.205.546			
		3.25.03.2.01.01	Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dok	1 Dok	75.000.000	1 Dok	80.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	110.000.000	1 Dok	120.000.000	5 Dok	485.000.000			
		3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	8 Unit	8 unit	1.512.000.000	8 unit	1.759.514.889	8 unit	1.625.870.797	9 unit	1.418.002.663	9 unit	1.711.414.424	42 Unit	8.026.802.773			
		3.25.03.2.01.03	Penjamin Ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	300 unit	300 unit	150.631.500	380 unit	534.215.973	470 unit	505.678.500	500 unit	627.876.800	550 unit	800.000.000	2200 unit	2.618.402.773			
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan kecil Dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Kelompok Nelayan yang meningkat Kapasitasnya	2351 Kapal Nelayan	15%	367.290.000	20%	372.799.350	25%	387.711.324	30%	434.236.683	30%	455.948.517	30%	2.017.985.874			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 org	200 org	297.290.000	200 org	293.290.000	200 org	300.160.600	200 org	305.876.500	200 org	310.192.200	1000 org	1.506.809.300		
		3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	20 Klp	20 Klp	70.000.000	20 Klp	70.000.000	20 Klp	75.000.000	20 Klp	77.000.000	20 Klp	80.400.000	100 Klp	372.400.000		
		3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	15 Unit Usaha	9.509.350	20 Unit Usaha	12.550.724	25 Unit Usaha	51.360.183	30 Unit Usaha	65.356.317	90 Unit Usaha	138.776.574		
		3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase TPI yang dibangun dan sesuai standar	2 TPI	15%	1.208.078.500	20%	1.304.989.788	25%	1.310.789.379	30%	1.350.084.104	30%	863.088.310	30%	6.037.030.081		
		3.25.03.2.03.01	Penetapan Prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0 dok	0 dok	-	1 dok	50.000.000	1 dok	60.000.000	1 dok	70.000.000	1 dok	80.000.000	4 Dok	260.000.000		
		3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4 Layanan	4 Layanan	1.208.078.500	1 Layanan	1.254.989.788	1 Layanan	1.250.789.379	1 Layanan	1.280.084.104	1 Layanan	783.088.310	8 Layanan	5.777.030.081		
		3.25.03.2.04	Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase Kapal yang telah memiliki tanda daftar	N/A	100%	65.000.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	485.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.25.03.2.04.01	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten /Kota	0 Dok	0 Dok	-	1 Dok	20.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	30.000.000	2 Dok	35.000.000	5 Dok	110.000.000		
		3.25.03.2.04.02	Pelayanan Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran samapai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	300 Rek	300 Rek	65.000.000	350 Rek	70.000.000	400 Rek	75.000.000	450 Rek	80.000.000	500 Rek	85.000.000	2000 Rek	375.000.000		
		3.25.05	Program Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase penurunan penggunaan racun ikan dan setrum di kawasan perikanan tangkap Persentase penurunan penggunaan keramba yang berlebihan di kawasan sungai	NA 80%	0% 0%	-	10% 25%	107.064.000	20% 30%	269.048.000	30% 35%	520.000.000	60% 40%	546.000.000	60% 40%	1.442.112.000	Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya	Kab Ketapang
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk,rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu)daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Sumber Daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk,rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu)daerah Kabupaten/Kota	NA		-	100%	65.760.000	100%	169.048.000	100%	400.000.000	100%	420.000.000	100%	1.054.808.000	Perikanan Tangkap	
		3.25.05.2.01.01	Pengawasan usaha perikanan tangkap diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten /Kota	0 Dok	0 Dok	-	1 Dok	65.760.000	1 Dok	169.048.000	1 Dok	400.000.000	1 Dok	420.000.000	1 Dok	1.054.808.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk,rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu)daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Sumber Daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk,rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu)daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	80%		-	25%	41.304.000	30%	100.000.000	35%	120.000.000	40%	126.000.000	40%	387.304.000	Perikanan Budidaya	
		3.25.05.2.01.02	Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, area dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten /Kota	0 Dok	0 dok	-	20 dok	41.304.000	35 dok	100.000.000	40 dok	120.000.000	40 dok	126.000.000	135 dok	387.304.000		
Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya		3.25.04	Program Pengelolaan perikanan budidaya	Persentase pelaku pembudidaya ikan yang terlatih	40%	60%	2.429.390.137	70%	4.157.342.459	80%	4.323.636.157	90%	4.842.472.496	100 %	5.084.596.120	100 %	20.837.437.369	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kab Ketapang
				Persentase peningkatan jangkauan distribusi benih ikan budidaya	NA	10%		15%		20%		25%		25%		25%			
				Persentase peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya	NA	10%		15%		20%		25%		25%		25%			
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persentase Kelompok Pembudidaya yang meningkat kapasitasnya	40%	60%	88.000.000	60%	89.320.000	62%	92.892.800	65%	104.039.936	70%	109.241.933	70%	483.494.669		
		3.25.04.2.02.01	Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	0 Klp	0 Klp	-	4 Klp	37.000.000	5 Klp	38.892.800	8 Klp	43.039.936	9 Klp	43.241.933	26 Klp	162.174.669		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	0 klp	0 klp	-	1 klp	5.000.000	2 klp	6.000.000	4 klp	7.000.000	6 klp	8.000.000	13 klp	26.000.000		
		3.25.04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	0 klp	0 klp	-	2 klp	10.000.000	2 klp	10.000.000	3 klp	11.000.000	5 klp	15.000.000	12 klp	46.000.000		
		3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 klp	5 klp	88.000.000	2 klp	37.320.000	2 klp	38.000.000	3 klp	43.000.000	3 klp	43.000.000	15 Klp	249.320.000		
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase UPR yang meningkat Kapasitasnya	55%	10%	500.094.137	15%	612.800.000	20%	620.000.000	25%	690.000.000	25%	705.000.000	25%	3.127.894.137		
		3.25.04.2.04.03	Penjamin Ketersediaan sarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 unit	2 unit	400.094.137	2 unit	507.800.000	2 unit	510.000.000	2 unit	565.000.000	3 unit	570.000.000	11 unit	2.552.894.137		
		3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	100 Orang	100 Orang	100.000.000	100 Orang	105.000.000	100 Orang	110.000.000	100 Orang	125.000.000	100 Orang	135.000.000	500 Orang	575.000.000		
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan ikan	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya	NA	10%	1.841.296.000	15%	3.455.222.459	20%	3.610.743.357	25%	4.048.432.560	25%	4.270.354.187	25%	17.226.048.563		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan informasi pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	180.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	300.000.000	1 Dok	400.000.000	1 Dok	500.000.000	5 Dok	1.580.000.000		
		3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 unit	3 unit	1.561.296.000	13 unit	3.155.222.459	13 unit	3.205.743.357	13 unit	3.538.432.560	13 unit	3.655.354.187	55 Unit	15.116.048.563		
		3.25.04.2.04.06	Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidaya Ikan di darat	Luas Lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dilindungi	-	2 Ha	100.000.000	3 Ha	100.000.000	1 Ha	105.000.000	1 Ha	110.000.000	1 Ha	115.000.000	8 Ha	530.000.000		
Meningkatkan Kualitas Produksi Perikanan		3.25.06	Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase lembaga penjaminan mutu pengolahan ikan segar yang berkembang	50%	70%	490.000.000	80%	658.508.000	90%	821.629.120	95%	920.224.614	100%	966.235.845	100%	3.856.597.579	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kab Ketapang
				Persentase nelayan yang menggunakan teknologi perikanan tangkap tepat guna	40%	55%		60%		65%		70%		80%					
				Persentase Pembudidaya Ikan yang menggunakan teknologi perikanan budidaya tepat guna	40%	0%		60%		65%		70%		80%					
		3.25.06.2.01	Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	Persentase pelaku pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil yang sudah terdaftar	50%	70%	-	80%	50.000.000	80%	70.000.000	85%	90.000.000	90%	110.000.000	90%	320.000.000		
		3.25.06.2.01.01	Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	0 dok	0 dok	-	2 dok	50.000.000	2 dok	70.000.000	2 dok	90.000.000	2 dok	110.000.000	8 dok	320.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.25.06.2.02	Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Persentase usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil yang meningkat kapasitasnya	40%	60%	100.000.000	60%	100.000.000	65%	170.000.000	70%	175.000.000	80%	182.000.000	80%	727.000.000		
		3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	20 unit usaha	20 unit usaha	100.000.000	20 unit usaha	100.000.000	20 unit usaha	170.000.000	20 unit usaha	175.000.000	20 unit usaha	182.000.000	100 Unit usaha	727.000.000		
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Persentase Tersedianya dan tersalurnya bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) kabupaten/kota	40%	0%	390.000.000	60%	508.508.000	65%	581.629.120	70%	655.224.614	80%	674.235.845	80%	2.809.597.579		
		3.25.06.2.03.01	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 ton	0 ton	-	450 ton	308.040.000	550 ton	317.561.600	600 ton	346.388.992	600 ton	359.708.441	2200 ton	1.331.699.033		
		3.25.06.2.03.02	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	4 Pelaku usaha	4 Pelaku usaha	390.000.000	3 Pelaku usaha	200.468.000	3 Pelaku usaha	264.067.520	3 Pelaku usaha	308.835.622	3 Pelaku usaha	314.527.404	16 Pelaku usaha	1.477.898.546		

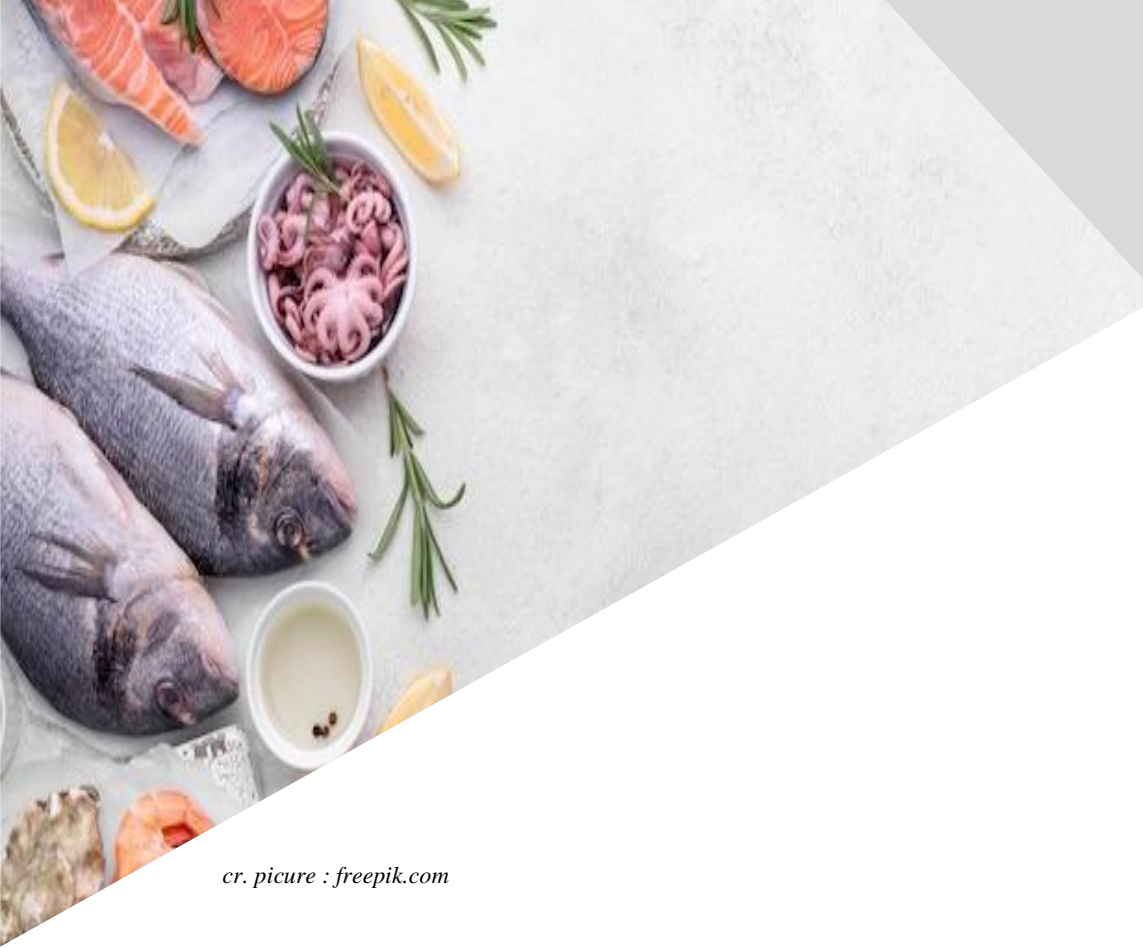
Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Urusan Penunjang					7.927.009.863		8.085.550.060		8.489.827.563		8.617.174.977		9.048.033.726		42.167.596.189			
		2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	68,30	69,50	7.927.009.863	69,84	8.085.550.060	73,25	8.489.827.563	76,50	8.617.174.977	80,75	9.048.033.726	80,75	42.167.596.189	Sekretariat	Kab. Ketapang	
				Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terpenuhi Sesuai Standar	90,00%	100,0 %		100,0 %		100,0 %		100,0 %		100,0 %		100,0 %				
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		83,27		84,75		86,2		87,8		90,1		90,1				
		2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar	70%	90%	260.000.000	95%	284.000.000	100%	307.850.000	100%	326.427.500	100%	352.741.628	100%	1.531.019.128	Sekretariat		
		2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	2 Dok	90.000.000	2 Dok	100.000.000	2 Dok	110.025.000	2 Dok	115.878.750	3 Dok	120.410.563	3 Dok	536.314.313			
		2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	10.000.000	1 Dok	11.000.000	1 Dok	12.225.000	1 Dok	13.208.750	1 Dok	15.490.063	1 Dok	61.923.813			
		2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	0 Dok	-	1 Dok	20.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	35.000.000	1 Dok	110.000.000			
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	10.000.000	1 Dok	11.000.000	1 Dok	12.225.000	1 Dok	13.208.750	1 Dok	15.490.063	1 Dok	61.923.813					
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dok	4 Dok	10.000.000	4 Dok	11.000.000	4 Dok	12.225.000	4 Dok	13.208.750	4 Dok	15.490.063	4 Dok	61.923.813					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap	2 Lap	70.000.000	2 Lap	65.500.000	2 Lap	70.575.000	2 Lap	70.461.250	2 Lap	70.430.438	2 Lap	346.966.688		
		2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	4 Lap	70.000.000	4 Lap	65.500.000	4 Lap	65.575.000	4 Lap	70.461.250	4 Lap	80.430.438	4 Lap	351.966.688		
		2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan serta tersusunnya laporan keuangan Sesuai Standar		90 %	5.993.038.240	100%	5.933.943.976	100%	6.372.149.092	100%	6.468.132.360	100%	6.657.536.698	100%	31.424.800.366		
		2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 OB	43 OB	5.873.000.000	43 OB	5.808.000.000	43 OB	6.240.398.520	43 OB	6.329.569.202	43 OB	6.507.589.066	43 OB	30.758.556.788		
		2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	106.038.240	1 Dok	110.943.976	1 Dok	115.235.572	1 Dok	120.270.908	1 Dok	130.461.544	1 Dok	582.950.240		
		2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	7.000.000	1 Lap	7.500.000	1 Lap	8.257.500	1 Lap	9.646.125	1 Lap	10.243.044	1 Lap	42.646.669		
		2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Semester Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2 Lap	2 Lap	7.000.000	2 Lap	7.500.000	2 Lap	8.257.500	2 Lap	8.646.125	2 Lap	9.243.044	2 Lap	40.646.669		
		2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Pengelolaan Aset Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	85,00	90,00 %	40.800.000	91%	40.920.000	92%	40.958.000	93%	41.051.700	95%	41.051.700	95%	204.781.400		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.09.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	1 Dok	3.000.000	1 Dok	3.000.000	1 Dok	3.000.000	1 Dok	3.000.000	1 Dok	12.000.000		
		2.09.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	1 Lap	3.000.000	1 Lap	3.000.000	1 Lap	3.000.000	1 Lap	3.000.000	1 Lap	12.000.000		
		2.09.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	1 Lap	40.800.000	1 Lap	34.920.000	1 Lap	34.958.000	1 Lap	35.051.700	1 Lap	35.051.700	5 Lap	180.781.400		
		2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	75,00%	80,00 %	10.000.000	82%	225.000.000	85%	275.500.000	87,00%	350.000.000	90%	395.000.000	90%	1.255.500.000		
		2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.500.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	35.000.000	5 Paket	125.500.000		
		2.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	-	-	8 Org	120.000.000	10 Org	150.000.000	12 Org	180.000.000	14 Org	210.000.000	44 Org	660.000.000		
		2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	-	8 Org	80.000.000	10 Org	100.000.000	12 Org	140.000.000	14 Org	150.000.000	44 Org	470.000.000		
		2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	100 %	535.400.000	100%	442.298.718	100%	554.925.000	100%	546.266.875	100%	551.925.094	100%	2.630.815.687		
		2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	11.225.000	1 Paket	11.225.000	1 Paket	12.490.063	5 Paket	54.940.063		
		2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	75.000.000	1 Paket	76.148.718	1 Paket	80.187.500	1 Paket	80.187.500	1 Paket	80.187.500	5 Paket	391.711.218		
		2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.675.000	1 Paket	30.675.000	1 Paket	30.675.000	5 Paket	152.025.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60 Dok	60 Dok	10.000.000	60 Dok	10.000.000	60 Dok	10.225.000	60 Dok	10.225.000	60 Dok	10.225.000	300 Dok	50.675.000		
		2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	305.400.000	1 Lap	205.400.000	1 Lap	310.750.000	1 Lap	311.262.500	1 Lap	314.701.875	5 Lap	1.447.514.375		
		2.09.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 Dok	1 Dok	105.000.000	1 Dok	110.750.000	1 Dok	111.862.500	1 Dok	102.691.875	1 Dok	103.645.656	5 Dok	533.950.031		
		2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan kelengkapan Barang perangkat daerah	70 %	75 %	652.000.000	80%	717.000.000	85%	490.000.000	90%	441.000.000	95%	585.021.875	95%	2.885.021.875		
		2.09.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	500.000.000	3 Unit	550.000.000	10 Unit	450.000.000	8 Unit	400.000.000	10 Unit	500.000.000	32 Unit	2.400.000.000		
		2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	15 unit	40.000.000	5 unit	10.000.000	5 unit	10.000.000	5 unit	10.000.000	30 unit	70.000.000		
		2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	4 unit	25.000.000	4 unit	25.000.000	4 unit	25.000.000	4 unit	25.000.000	5 unit	30.000.000	21 unit	130.000.000		
		2.09.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Aset Tetap Lainnya Yang Disediakan	0 unit	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	5 unit	5.000.000		
		2.09.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	0 unit	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	5 unit	5.000.000		
		2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	1 Unit	100.000.000	1 unit	50.000.000	0 unit	-	1 unit	4.000.000	1 unit	5.000.000	4 unit	159.000.000		
		2.09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	1 unit	25.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	3.000.000	0 unit	-	2 unit	38.021.875	5 unit	116.021.875		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kelancaran Pelayanan Penunjang Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	233.000.000	100%	235.450.000	100%	236.117.500	100%	229.890.000	100%	246.107.894	100%	1.180.565.394		
		2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 lap	2 lap	3.000.000	2 lap	3.450.000	2 lap	3.967.500	2 lap	3.967.500	2 lap	5.247.019	2 lap	19.632.019		
		2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lap	3 Lap	140.000.000	3 Lap	142.000.000	3 Lap	142.150.000	3 Lap	145.922.500	3 Lap	150.860.875	3 Lap	720.933.375		
		2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	90.000.000	1 Lap	90.000.000	1 Lap	90.000.000	1 Lap	80.000.000	1 Lap	90.000.000	1 Lap	440.000.000		
		2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang milik daerah yang terpelihara		70%	202.771.623	80%	206.937.366	90%	212.327.971	95%	214.406.542	100%	218.648.837	100%	1.055.092.339		
		2.09.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 unit	32 unit	167.771.623	33 unit	170.937.366	36 unit	175.877.971	46 unit	176.159.667	54 unit	177.433.617	54 unit	868.180.244		
		2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 unit	28 unit	10.000.000	30 unit	11.000.000	32 unit	11.225.000	34 unit	11.225.000	35 unit	12.490.063	35 unit	55.940.063		
		2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	1 unit	15.813.125	1 unit	16.235.094	1 unit	77.048.219		
		2.09.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	1 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.225.000	2 unit	11.208.750	3 unit	12.490.063	3 unit	53.923.813		
TOTAL							15.460.400.000		19.782.365.882		20.678.867.457		21.950.970.148		22.899.484.644		100.772.088.131		



cr. picture : freepik.com

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.

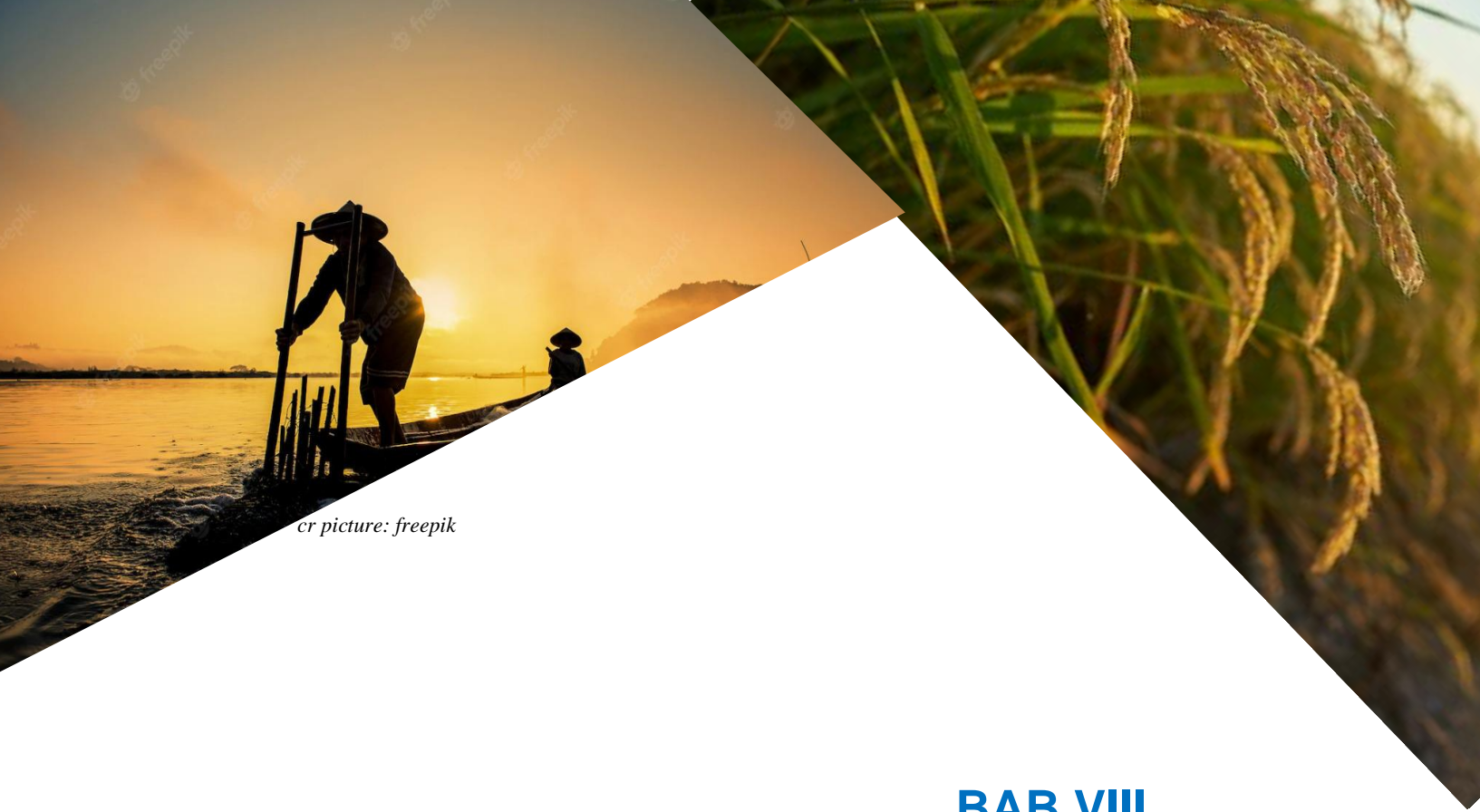
Perumusan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2021 pada lampiran Bab VIII yang mengatur terkait dengan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Kabupaten Ketapang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Selanjutnya indikator kinerja utama tersebut akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang setiap tahun sebagai bentuk komitmen bersama dengan semua bidang untuk mencapai target yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel 7.1 (T-C.28) berikut ini.

Tabel 7.1. (T-C.28)
Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks ketersediaan	Angka	85,82	86,73	87,64	87,96	88,84	88,97	88,97
2	Indeks keterjangkauan	Angka	81,21	82,32	83,43	83,85	84,74	84,87	84,87
3	Indeks Pemanfaatan	Angka	60,32	61,43	62,44	62,56	63,44	63,88	63,88
4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	22.207,32	24.428,05	26.648,78	28.869,52	31.090,24	33.310,98	33.310,98
5	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	18.898,12	20.787,93	22.866,73	25.153,40	27.668,73	30.435,61	30.435,61
6	Persentase Produk Perikanan yang bersertifikat	Persen	10%	11%	11%	12%	12%	12%	12%
7	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai	3,48	12 (C)	17 (C)	20 (CC)	21,8 (B)	23 (B)	23 (B)

Setiap awal tahun anggaran akan ditetapkan Perjanjian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama secara berjenjang untuk melaksanakan program dan kegiatan. Kemudian setelah itu disusun rencana aksi kinerja dan secara berkala setiap triwulan dilakukan evaluasi atas rencana aksi kinerja. Kemudian setelah selesai pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran, maka pada awal tahun anggaran berikutnya akan diukur pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama yang akan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.



cr picture: freepik

BAB VIII

PENUTUP



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode waktu 5 (lima) tahun yang menjabarkan rencana pelaksanaan berbagai program dan kegiatan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi DKPP disertai dengan rencana pendanaan indikatif pada masing-masing program dan kegiatan sehingga diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan yang terencana dengan baik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Renstra DKPP Tahun 2021-2026 ini disusun dan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. Renstra ini akan menjadi panduan bagi DKPP Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, serta untuk mengendalikan upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Renstra ini juga selanjutnya akan menjadi bahan untuk mengukur kinerja pelayanan DKPP. Bentuk Penjabaran dari Renstra ini setiap tahun akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA) DKPP Kabupaten Ketapang,

Rencana Strategis DKPP Tahun 2021-2026 ini akan dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis DKPP Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran pegawai DKPP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Sumber dana untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis DKPP ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dapat juga bersumber dari APBN termasuk DAK sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pengendalian dan Evaluasi dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Kepala Dinas melalui Laporan Evaluasi RENJA secara triwulanan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja DKPP Kabupaten Ketapang.